

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI DANA DESA**

**(STUDI DESA SUKANEGERI JAYA, KECAMATAN TALANG PADANG,
KABUPATEN TANGGAMUS)**

(Skripsi)

Oleh

SYILVANI ASYIFA

NPM 2016011008



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI
KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI DANA DESA**

**(STUDI DESA SUKANEGERI JAYA, KECAMATAN TALANG PADANG,
KABUPATEN TANGGAMUS)**

Oleh
SYILVANI ASYIFA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI**

Pada

**Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI DANA DESA (STUDI DESA SUKANEGERI JAYA, KECAMATAN TALANG PADANG, KABUPATEN TANGGAMUS)

Oleh

SYILVANI ASYIFA

Salah satu provinsi di Indonesia yang masih terdapat kemiskinan adalah Provinsi Lampung. Kabupaten Tanggamus sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Lampung yang memiliki persentase penduduk miskin bersifat fluktuatif tetapi 3 tahun terakhir mengalami penurunan. Desa Sukanegeri Jaya merupakan wilayah di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang mengalami permasalahan kemiskinan akibat kurangnya lahan pertanian yang menjadikan warga lebih banyak menjadi buruh tani dan kebijakan pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt Dd) selama pandemi COVID-19 membuat masyarakat ketergantungan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa yang diperoleh, kendala-kendala yang terjadi, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat yang tergabung dalam pemberdayaan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur kepada pemerintah desa, pengurus BUMDes, pengurus PKK, unit-unit mitra BUMDes, serta anggota PKK. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara semi tersruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah desa menyuntikkan modal kepada BUMDes dan mendanai pelatihan PKK sebagai bentuk pemberdayaan. Kendala utama yang dihadapi meliputi pemasaran yang belum optimal, pengembalian modal yang lambat, pola pikir masyarakat, dan keterbatasan bahan baku. Meskipun demikian, program ini berdampak positif dalam membuka akses permodalan, meningkatkan pendapatan, dan menambah keterampilan warga. Kesimpulannya, program pemberdayaan masyarakat di Desa Sukanegeri Jaya telah memberikan dasar yang kuat untuk mengatasi kemiskinan. Disarankan untuk pemerintah desa memberikan pelatihan pemasaran digital yang lebih intensif kepada masyarakat, masyarakat lebih memanfaatkan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah desa, serta untuk penelitian selanjutnya dapat membahas lebih kompleks dari penelitian ini.

Kata kunci: Usaha Lokal, BLT DD, Se'at Jaya, BUMDes, PKK

ABSTRACT

***Efforts of the Village Government to Alleviate Poverty through Community Empowerment Utilizing Village Funds
(A Case Study in Sukanegeri Jaya Village, Talang Padang District, Tanggamus Regency)***

By

Sylvani Asyifa

Lampung Province remains among the regions in Indonesia experiencing persistent poverty. Tanggamus Regency has shown fluctuating poverty rates, although a downward trend has occurred in the last three years. Sukanegeri Jaya Village, located in Talang Padang Subdistrict, Tanggamus Regency, is one of the areas still struggling with poverty due to limited agricultural land. This condition causes most residents to work as agricultural laborers. Moreover, the distribution of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT DD) during the COVID-19 pandemic has increased the community's dependency on aid. This study aims to examine the village government's efforts in alleviating poverty through community empowerment programs funded by village funds, identify the challenges faced in implementing these programs, and analyze the perceived impacts on beneficiaries. The study employs a qualitative research method using semi-structured interviews, observation, and documentation. Informants include village officials, administrators of Village-Owned Enterprises (BUMDes), members of the Family Welfare Empowerment (PKK) team, and business unit partners. Findings reveal that the village government has allocated capital to BUMDes and financed PKK training programs to enhance local skills and economic opportunities. Challenges encountered include suboptimal marketing, slow capital turnover, limited raw materials, and mindset barriers among the population. Despite these challenges, the programs have had positive impacts, such as improved access to capital, increased household income, and enhanced community capacity. In conclusion, community empowerment initiatives in Sukanegeri Jaya Village have laid a solid foundation for sustainable poverty alleviation. It is recommended that the village government intensify digital marketing training, encourage stronger participation from the community, and that future research explore broader aspects of rural poverty reduction.

Keywords: Local Enterprise, BLT DD, Se'at Jaya, BUMDes, PKK

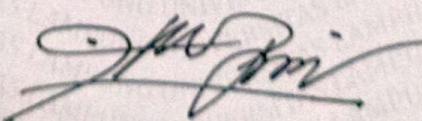
Judul : **UPAYA PEMERINTAH DESA DALAM
MENANGGULANGI KEMISKINAN
BERBASIS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT MELALUI DANA DESA**
**(Studi Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan
Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)**

Nama Mahasiswa : **Syilvani Asyifa**
Nomor Pokok Mahasiswa : **2016011008**
Program Studi : **Sosiologi**
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Drs. Usman Raidar, M.Si.
NIP. 19601119 198802 1 001

2. Ketua Jurusan



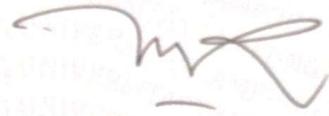
Damar Wibisono, S.Sos., M.A.
NIP. 198503152014041002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

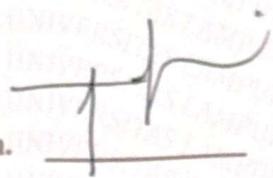
Ketua

: Drs. Usman Raidar, M.Si.



Penguji Utama

: Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Tanggal Ujian Skripsi: 30 Juli 2025

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 04 Mei 2002, sebagai anak terakhir, yaitu anak keempat dari empat bersaudara, dari bapak Salwani dan Ibu Zumro Tul Aini. Berbangsa Indonesia, bersuku campuran antara Betawi dan Banten. Penulis terlahir dengan beragama yang indah, yaitu Islam.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis, yaitu:

1. Sekolah Dasar Negeri 1 Rajabasa Jaya Kota Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2014
2. Sekolah Menengah Pertama Negeri 18 Kota Bandar Lampung yang di selesaikan pada tahun 2017
3. Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Kota Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020

Pada tahun 2020, penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis mengikuti kegiatan organisasi jurusan, yaitu sebagai anggota bidang pengabdian masyarakat di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Sosiologi tahun 2021-2022. Pada Januari-Februari 2023, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Bumi Agung, Kecamatan Belalau, Lampung Barat. Kemudian, penulis mengikuti Praktik Kerja Lapangan di Kantor Balai Pemerintahan Desa di Lampung Kementerian Dalam Negeri.

MOTTO

"Tak semua yang hilang benar-benar pergi, ada yang tetap tinggal dalam diam, membentuk luka yang perlahan menumbuhkan kekuatan. Dari perih itulah Allah mengajarkan untuk bertahan, bukan sekadar untuk tetap hidup tapi untuk tumbuh, bahkan saat dunia terasa terlalu berat untuk dipijak."

(Sylvani Asyifa)

"Dari kepergiannya yang senyap, mencoba kembali belajar untuk menyalakan langkah, karena ada cinta yang pergi, tetapi tak pernah padam di dalam dada,"

(Sylvani Asyifa)

"Aku mengakui keterbatasan diriku, namun aku yakin Allah tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang yang tidak pernah lelah untuk berdoa dengan sungguh-sungguh."

(Q.S. Maryam ayat 4)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alaamiin

Segala Puji bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna

Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW

Dengan ketulusan hati dan kasih sayang yang besar,

aku persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

Skripsi ini kupersembahkan untuk dua jiwa yang menjadi awal mula hidupku, yaitu untuk Ibu, yang kini memikul beban sebagai kepala keluarga tanpa pernah mengeluh, tetap berdiri teguh di tengah kehilangan, menjadi cahaya yang tak padam meski langit telah kehilangan separuh cahayanya dan untuk Ayah yang kepergiannya menyisakan sunyi paling lantang dalam dadaku, namun juga warisan keteguhan dan cinta yang tak pernah benar-benar selesai. Engkau adalah api pertama yang mengajarkanku tentang arti kekuatan, tentang bagaimana kehidupan harus ditempa, seperti besi panas di bawah palu, keras tapi penuh makna. Dalam denting logam yang pernah kau pukul, aku kini mendengar pesan bahwa hidup harus terus dibentuk meski tangan gemetar. Maaf jika aku belum sempat menjadi anak yang membuatmu bangga. Ayah, maaf untuk kata-kata yang tertunda, untuk waktu yang tak sempat kita selesaikan. Maka biarkanlah tulisan ini menjadi secuil penebusan, sebentuk kecil dari ikhtiar menunaikan janji yang tak pernah terucap. Dan untukmu, Ibu, yang tak hanya menjadi pelindung tetapi juga arah, yang diam-diam menyimpan luka tapi tetap tersenyum di hadapanku, terima kasih atas kasih sayang yang tak pernah habis, atas ketegaranmu yang membuatku tetap berdiri. Skripsi ini bukan sekadar akhir dari sebuah studi, melainkan bagian dari doa, dari duka yang pelan-pelan aku sulam menjadi kekuatan, dari cinta yang meski kehilangan tetap tumbuh dalam diam. Untuk Ibu,

segala cinta dan hormatku. Untuk Ayah, segala rindu dan janji yang akan terus kupenuhi sepanjang hidupku.

Kakak Perempuan Tercinta

Untuk kakakku tersayang, sosok sulung yang diam-diam memikul begitu banyak beban, namun tak pernah mengeluh, tak pernah lelah, dan tak pernah lalai menjadi pelindung bagi kami, adik-adikmu. Engkau adalah pelita yang tetap menyala meski berkali-kali diterpa gelap, yang selalu hadir saat kami terjatuh, yang selalu menjadi tempat pulang saat hidup terasa terlalu asing. Dalam segala tindakanmu, engkau mengajarkan aku arti bertahan bukan dengan kata-kata, tapi dengan keteladanan, dengan keberanianmu mengambil peran sebagai bahu bagi luka-luka kami. Di saat dunia kami runtuh satu per satu, engkaulah yang memungut serpihannya dan menyatukannya kembali agar kami tetap utuh. Engkau bukan hanya seorang kakak, tapi penjaga arah, penjaga rasa aman, dan penjaga semangat dalam setiap langkah yang kami ragukan. Terima kasih karena tak pernah berpaling, karena selalu ada bahkan ketika kami lupa menghargainya. Persembahan ini kutulis sebagai wujud kecil dari cinta dan hormatku, yang mungkin selama ini lebih banyak diam daripada terucap.

Kedua Kakak Laki-laki

Untuk kedua kakak laki-lakiku, terima kasih telah menjadi bahu yang tak pernah roboh, pelindung yang tak pernah lelah, dan kekuatan yang diam-diam menopang langkahku. Dalam diam kalian, tersimpan kasih yang tak banyak ditunjukkan, tapi selalu terasa saat dibutuhkan. Kalian juga sebagai tempatku berpulang saat dunia terasa terlalu berat dan juga sebagai penjaga yang tak meminta pujian, namun selalu ada dalam setiap badai.

Para Pendidik dan Bapak Ibu dosen

Untuk Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing dengan kesabaran, keikhlasan, ilmu yang tak ternilai, dan motivasi.

Almamaterku

Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirobbilalaamiin, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa (Studi Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya suatu usaha maksimal, bimbingan serta bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan ridho serta keberkahan ilmunya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini;
2. Terkhusus untuk kedua orangtuaku, Bapak Salwani dan Ibu Zumro Tul Aini yang tak henti menanamkan cinta dalam letih dan doa. Terima kasih atas segala pengorbanan, peluh yang diam-diam jatuh demi masa depanku, dan kasih sayang yang tak pernah putus walau tak selalu terucap. Segala pencapaian ini tak akan berarti tanpa restu dan ridho kalian berdua. Semoga langkahku selalu menjadi cermin dari doa-doa yang kalian panjatkan. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ibu. Kalian adalah alas dari setiap pijakan hidupku;
3. Kakak perempuanku tersayang, Syaefi Zakia terima kasih selalu menjadi cahaya untuk adik bungsumu ini. Uluran tanganmu begitu hangat, lembut, namun kuat seolah memberikan semangat yang penuh pada diriku. Kata orang-orang kakak perempuan pertama adalah pengganti Ibu dan sungguh nyata kasih sayangmu sehangat kasih sayang seorang ibu. Terima kasih atas ketegasanmu akan hal pentingnya pendidikan serta dukungan moril dan

materil darimu untukku terus melanjutkan pendidikan ini. Pengorbananmu tidak akan pernah aku lupakan. Tanpamu juga aku tidak akan bisa sampai di titik ini;

4. Kedua kakak laki-lakiku yang tersayang, Ikbal Assobri dan Ghofar Alfarizi, kalian adalah sosok panutan yang mungkin tak pernah minta dihormati, tapi selalu layak untuk dihargai. Terima kasih atas perhatian kalian terutama selalu menyediakan waktu untuk, mengantar dan menjemputku selama menyusun skripsi atau menyediakan kendaraan untukku jika kalian tidak bisa mengantar atau menjemputku. Terima kasih juga atas nasihat yang selalu kalian berikan untuk terus menyemangatiku. Dalam sikap sederhana kalian, aku belajar kuat. Semoga kebaikan yang kalian tanam tumbuh dalam hidupku dan menjadi bekal untuk aku terus melangkah;
5. Ipar laki-lakiku, Andi Kurniawan yang bukan sekedar ipar saja tetapi juga sudah seperti kakak laki-laki sendiri, terimakasih sudah mendukungku, memberikanku arahan dan masukan selama mengerjakan skripsi yang seharusnya ditulis dan tidak ditulis;
6. Ipar perempuanku, Lia Puspita Sari yang sudahku anggap juga sebagai kakak perempuanku sendiri. Terimakasih selalu memberikanku semangat dan menjadi tempat berkeluh kesah;
7. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si. selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
9. Bapak Damar Wibisono, S.Sos., M.A selaku Ketua Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung;
10. Bapak Prof. Dr. Hartoyo, M.Si., selaku dosen pembimbing akademik penulis. Terima kasih telah memberikan motivasi dan bimbingan selama masa perkuliahan;
11. Bapak Drs. Usman Raidar, M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan dan tanggung jawab yang tak sedikit untuk terus membimbing dan berdiskusi dengan sabar, memberikan saran, motivasi, dan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Bimbingan

dan ilmu yang bapak berikan bukan hanya menjadi bekal akademik, tetapi juga nilai hidup yang akan terus saya jaga. Terima kasih atas dedikasi, ketulusan, dan kepercayaan yang diberikan. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah yang bapak kerjakan;

12. Bapak Teuku Fahmi, S.Sos., M.Krim, selaku dosen penguji skripsi. Terima kasih atas saran, masukan, dan kemudahannya selama saya mengerjakan skripsi. Terima kasih banyak juga kepada bapak karena selalu bersedia ketika saya meminta bimbingan atau arahan dalam mengerjakan skripsi. Semoga bapak selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam setiap langkah yang bapak kerjakan;
13. Seluruh Dosen Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang luar biasa selama masa perkuliahan;
14. Seluruh Staf Administrasi FISIP, Universitas Lampung yang telah membantu dan melayani segala administrasi perkuliahan;
15. Seluruh Staf Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Bina Pemerintahan Desa di Lampung yang telah membantu, mendidik, dan memberikan saran selama proses magang;
16. Sepupuku, Tri Julianti terima kasih banyak sudah bersedia meminjamkan laptopnya disaat laptop saya rusak serta terimakasih atas dukungan semangatnya;
17. Teman-teman seperjuangan Sosiologi angkatan 2020 dan teman-teman seperjuangan dalam organisasi kemahasiswaan HMJ Sosiologi 2021-2022;
18. Teman-teman KKN Bumi Agung, Tamara, Meliana, Dekantina, Rafli, Ilham, Damar terima kasih dukungannya;
19. Seluruh Perangkat Desa Sukanegeri Jaya terima kasih sudah menerima saya untuk melakukan penelitian di Desa Sukanegeri Jaya;
20. Warga Desa Sukanegeri Jaya yang bersedia saya wawancara, terima kasih atas informasinya;
21. Teman-teman terdekat semasa menempuh perkuliahan Hida, Doni, Denis, dan Laini;

22. Sahabat-sahabat SMA, Dian, Ade, dan Via terima kasih atas bantuan dan dukungan kalian selalu mau menemani dan membantuku dalam memberikan informasi seputar skripsi;
23. Ayunika Prasetiana, sahabat seperjuanganku kita bertemu ketika kuliah tetapi seperti sudah lama mengenal. Terima kasih selalu mengajak bimbingan bersama, mengurus berkas-berkas bersama, saling membantu mengerjakan skripsi;
24. Anggi Prayoga, terima kasih telah hadir, bersabar, dan bertahan bersamaku di tengah proses yang tidak selalu mudah, penuh luka, lelah, dan segala perjuangan yang tak selalu terlihat. Di saat semangat mulai pudar dan jalan terasa berat, kamu tetap ada, memberi ruang untuk tenang, tanpa banyak tuntutan. Dukungan dan pengertianmu menjadi bagian penting yang tak bisa dipisahkan dari selesainya perjalanan ini. Terima kasih telah menjadi seseorang yang tetap tinggal, bahkan ketika semuanya terasa tidak pasti.
25. Untuk diriku sendiri, Syilvani Asyifa terima kasih. Terima kasih sudah bertahan, bahkan ketika hati nyaris tak kuat lagi menampung luka. Terima kasih sudah memilih untuk bangkit, walau dunia terasa runtuh dan kehilangan menyayat begitu dalam. Di tengah tangis yang sunyi dan lelah yang tak pernah selesai, kamu tetap melangkah. Kamu tetap percaya, bahwa hidup ini masih layak diperjuangkan. Teruslah bertahan, bukan hanya demi cita-cita, tapi demi janji yang pernah kamu ikrarkan dalam diam untuk Ibunda yang kini menjadi segalanya, dan untuk Almarhum Ayahanda yang telah menitipkan harapan terakhirnya padamu. Jangan lupa, kamu layak bahagia, kamu pantas berhasil. Peluk dirimu erat-erat, karena tak ada yang tahu seberapa keras kamu berjuang, selain dirimu sendiri;
26. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini penulis berdoa dan berharap agar Allah SWT membalas semua kebaikan, motivasi, dan bantuan yang telah kalian berikan kepada penulis. Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandar lampung, 24 Juli 2025
Penulis

Syilvani Asyifa

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Sistem Pemerintahan Desa	10
2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa	10
2.1.2 Elemen-elemen Pemerintahan Desa	10
2.2 Tinjauan Kemiskinan	12
2.2.1 Pengertian Kemiskinan.....	12
2.2.2 Indikator Kemiskinan	14
2.2.3 Penanggulangan Kemiskinan.....	16
2.3 Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.3.1 Pengertian Pemberdayaan masyarakat	21
2.3.2 Indikator Pemberdayaan Masyarakat	22
2.3.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.4 Tinjauan Dana Desa	24
2.4.1 Pengertian Dana Desa.....	24
2.4.2 Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	25
2.4.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa.....	26
2.5 Landasan Teori Stuktural Fungsional oleh Talcott Parsons	28

2.6 Penelitian Terdahulu.....	30
2.7 Kerangka Berpikir	33
III. METODE PENELITIAN	37
3.1 Tipe Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian	38
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Penentuan Informan	39
3.5 Sumber Data	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisis Data.....	43
IV. GAMBARAN UMUM.....	47
4.1 Gambaran Umum Desa Sukanegeri Jaya	47
4.1.1 Sejarah Desa Sukanegeri Jaya	47
4.1.2 Geografis Desa Sukanegeri Jaya	47
4.1.3 Demografis Desa Sukanegeri Jaya	48
4.2 Pembangunan Desa Sukanegeri Jaya	54
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	56
5.1 Hasil.....	56
5.1.1 Profil Informan	56
5.1.2 Potret Kemiskinan dan Bantuan Sosial di Desa Sukanegeri Jaya	61
5.1.3 Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa	65
5.1.4 Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa	96
5.1.5 Dampak yang Dirasakan oleh Masyarakat dari Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan yang Dibentuk Pemerintah Desa melalui Dana Desa di Desa Sukanegeri Jaya	102
5.2 Pembahasan	107
5.2.1 Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa yang Diperoleh di Desa Sukanegeri Jaya	108
5.2.2 Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana Desa di Desa	

Sukanegeri Jaya	111
5.2.3 Dampak yang Dirasakan oleh Masyarakat dari Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menanggulangi Kemiskinan yang Dibentuk Pemerintah Desa melalui Dana Desa di Desa Sukanegeri Jaya	114
VI KESIMPULAN	112
6.2 Kesimpulan.....	112
6.3 Saran	113
Daftar Pustaka.....	115
LAMPIRAN.....	117
Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	118
Lampiran 2: Transkrip Wawancara	123
Lampiran 3: Dokumentasi Penulis	195
Lampiran 4: Surat Keterangan Perizinan Penelitian	198

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Anggaran BLT DD dan Jumlah Warga Penerima di Desa Sukanegeri Jaya.....	4
2. Rincian Dana Desa Desa Sukanegeri Jaya tahun 2020-2024.....	6
3. Penentuan Informan	40
4. Sumber Data.....	41
5. Teknik Pengumpulan Data.....	42
6. Teknik Analisis Data.....	45
7. Keragaman Suku di Desa Sukanegeri Jaya.....	49
8. Sarana Pendidikan Desa Sukanegeri Jaya.....	51
9. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sukanegeri Jaya	53
10. Hasil Wawancara Potret Kemiskinan dan Bantuan Sosial.....	65
11. Hasil Wawancara Upaya Pemerintah Desa Menanggulangi Kemiskinan	68
12. Hasil Wawancara Kerja Sama Antara Usaha Lokal dengan BUMDes.....	75
13. Hasil Wawancara Unit Jaga Karya	83
14. Hasil Wawancara Unit Sanggar Putri Ayu.....	89
15. Hasil Wawancara Pelatihan Pembuatan Keripik dalam PKK.....	95
16. Hasil Wawancara Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan	102
17. Hasil Wawanacara Dampak yang Dirasakan oleh Masyarakat.....	107
18. Hasil Pembahasan Analisis Teori Struktural Fungsional.....	110
19. Hasil Pembahasan Kendala dalam Menanggulangi Kemiskinan.....	113
20. Hasil Pembahasan Dampak yang Dirasakan oleh Masyarakat	115

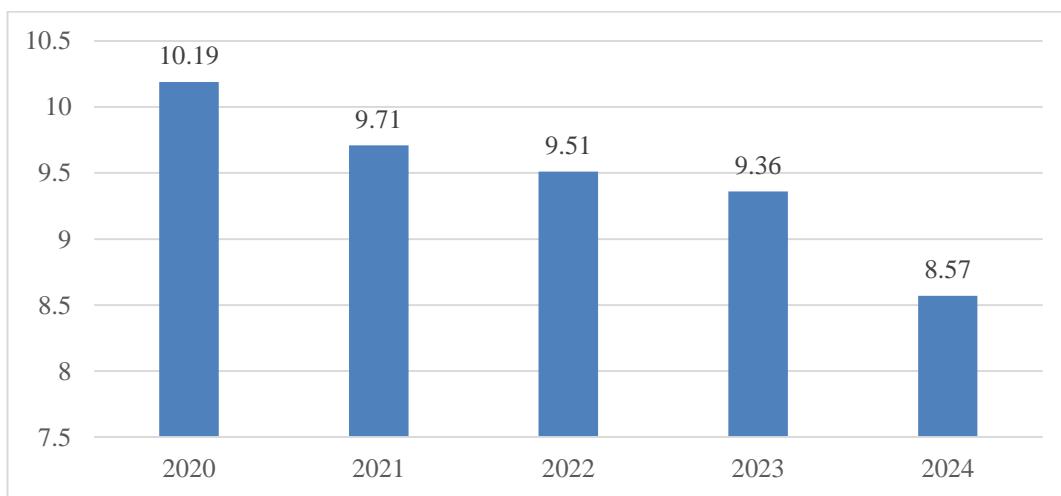
DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2020-2024.....	1
2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Lampung tahun 2024 ...	2
3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus tahun 2020-2024	3
4. Kerangka Berpikir	35
5. Jenjang Pendidikan yang sedang ditempuh Penduduk Desa Tahun 2024	51
6. Profil Lulusan Pendudukan Desa Sukanegeri Jaya 2024	52
7. Presentase Anggaran dan Belanja Desa Sukanegeri Jaya 2025	55
8. Indeks Desa Membangun Sukanegeri Jaya 2021-2024	56
9. Dokumentasi Kegiatan Keagamaan	195
10. Dokumentasi Kegiatan Masyarakat dan PKK.....	195
11. Kegiatan Kebudayaan Desa Sukanegeri Jaya	196
12. Kegiatan Unit Jaga Karya	196
13. Kegiatan Wawancara Sanggar Putri Ayu.....	197
14. Kegiatan Wawancara PKK	197

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang diukur berdasarkan persepsi dirinya. Ketidakmampuan ini tidak hanya berdasarkan ekonomi, melainkan ketidakmampuan dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Namun dalam berbagai analisis, untuk mempermudah pengertian kemiskinan lebih banyak menggunakan pengertian sempit bahwa kemiskinan hanya berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi. Kemiskinan sebagai permasalahan aktual dari masa ke masa yang tidak pernah berhenti menarik perhatian berbagai golongan, yaitu golongan akademisi dan golongan praktisi. Terdapat berbagai teori, konsep, dan pendekatan dari berbagai ilmu pengetahuan yang selalu dikembangkan oleh golongan akademisi dan praktisi untuk memecahkan dilema mengenai kemiskinan ini (Hilmi et al., 2022).

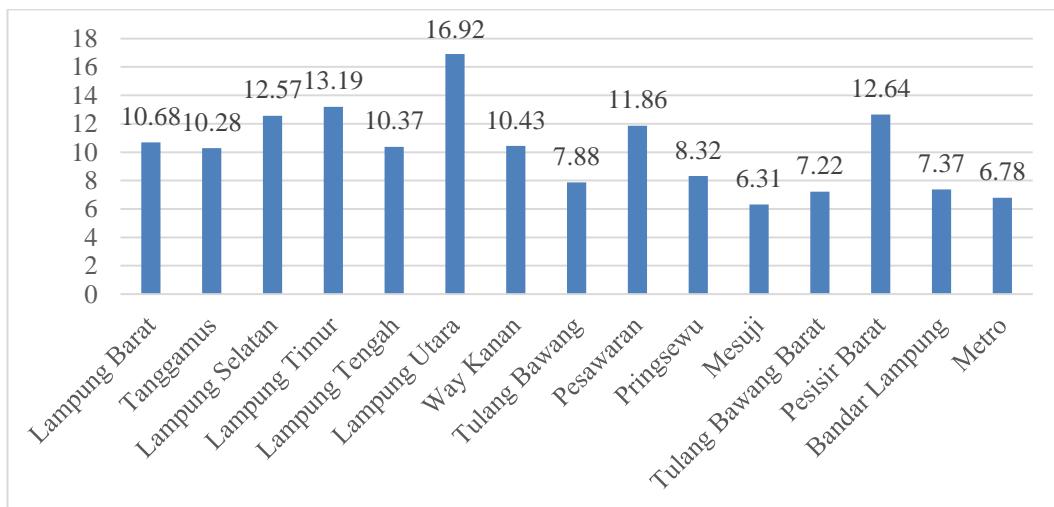


Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Gambar diagram di atas mengambarkan terkait persentase penduduk miskin di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2020 presentase penduduk miskin sebesar 10,19%. Jumlah kemiskinan tersebut terjadi karena munculnya pandemi COVID-19 yang membuat banyak masyarakat produktif dan non produktif terinfeksi sehingga kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi berkurang. Selain itu, terdapatnya kebijakan pembatasan kegiatan sosial yang diimplementasikan pemerintah dengan tujuan untuk mencegah penyebaran penyakit mentidakitbatkan perekonomian tidak berjalan secara optimal dikarenakan banyaknya usaha yang harus tutup dan sebagian pekerja terpaksa dirumahkan. Namun, pada tahun 2021 hingga tahun 2024 presentase penduduk miskin cenderung mengalami penurunan (Izzati, 2021).

Permasalahan kemiskinan di Indonesia terpencar pada beberapa provinsi yang ada, salah satunya adalah Provinsi Lampung. Pada daerah Provinsi Lampung permasalahan kemiskinan terpencar di kabupaten dan kota sebagai berikut:

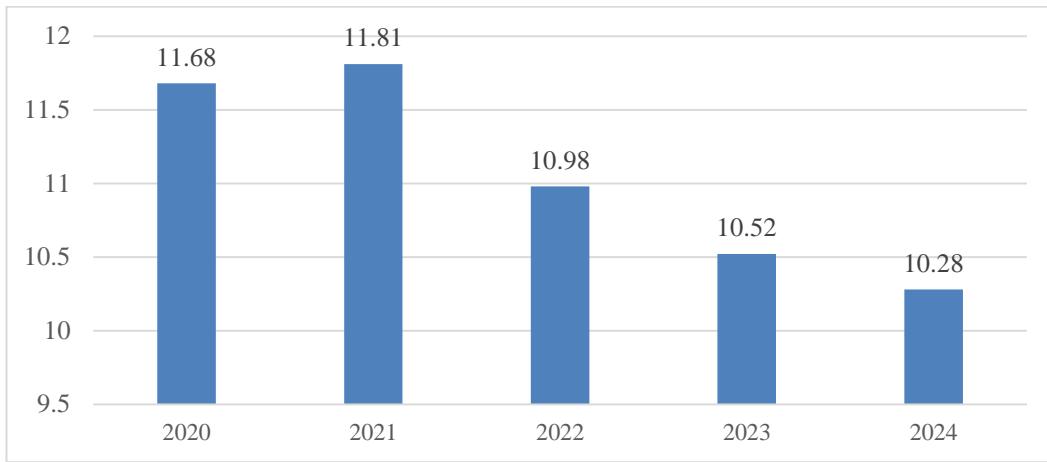


Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten dan Kota di Lampung tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan diagram di atas menunjukkan Tanggamus merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Lampung yang masih terdapat penduduk miskin. Dari kelima belas kabupaten dan kota di Provinsi Lampung 5 urutan persentase penduduk miskin terendah diduduki oleh Mesuji sebesar 6,31%, Metro sebesar 6,78%, Tulang Bawang Barat 7,22%, Bandar Lampung 7,37%, dan Tulang Bawang

7,88%. Sementara, Tanggamus berada pada urutan ketujuh dengan persentase sebesar 10,28% dari yang terendah setelah Kabupaten Pringsewu sebesar 8,32%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di Kabupaten Tanggamus berada diposisi tengah. Selain itu, presentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanggamus bersifat fluktuatif sebagai berikut:



Gambar 3. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Tanggamus tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2025

Berdasarkan diagram di atas menggambarkan bahwa pada tahun 2020 persentase penduduk yang mengalami kemiskinan di Kabupaten Tanggamus sebesar 11,68%. Namun, pada tahun 2021 persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanggamus mencapai 11,81%, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,18% dari tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanggamus tersebut disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang mentidakibatkan perekonomian tidak stabil. Kemudian, pada tahun 2022 persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tanggamus berhasil turun menjadi 10,98%. Hingga tahun 2023-2024 persentase penduduk miskin di Tanggamus lalu mengalami penurunan.

Desa Sukanegeri Jaya adalah salah satu desa yang wilayahnya berada di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Desa Sukanegeri Jaya sebagai salah satu desa yang terdampak kemiskinan dari munculnya pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil wawancara, kemiskinan menjadi meningkat semenjak

penerapan kebijakan untuk mencegah penularan dan penambahan jumlah korban yang tertular virus COVID-19, seperti *physical distancing*, *social distancing*, dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Pada kenyataannya, kebijakan yang diterapkan tersebut telah mempengaruhi kegiatan perekonomian menjadi terhambat sehingga menurunkan tingkat penghasilan masyarakat. Bahkan, World Bank menyatakan kebijakan-kebijakan tersebut menyebabkan perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2% (Suparman et al., 2021).

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penggunaan Prioritas Dana Desa yang berkaitan dengan penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang berasal dari Dana Desa untuk menanggulangi keluarga miskin ataupun keluarga tidak mampu yang terdampak dari adanya pandemi COVID-19. Meskipun, pada saat itu perekonomian sedang goyah akibat beberapa kebijakan sebelumnya, masyarakat Desa Sukanegeri Jaya sebenarnya masih dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya harus tetap menerapkan peraturan terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) yang telah ditetapkan dan terpaksa menjadikan beberapa masyarakat menjadi miskin untuk memenuhi tuntuan dari peraturan tersebut. Berikut adalah besaran dana desa yang dikucurkan untuk BLT DD dan jumlah warga yang menerimanya:

Tabel 1. Anggaran BLT DD dan Jumlah Warga Penerima di Desa Sukanegeri Jaya

Tahun	Anggaran BLT DD (Rp)	Jumlah Warga Penerima
2020	173.700.000	134
2021	126.000.000	35
2022	259.200.000	72
2023	72.000.000	20
2024	18.000.000	5

Sumber: Data Sekunder Desa Sukanegeri Jaya, 2024

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa anggaran dana desa untuk BLT di Desa Sukanegeri Jaya yang paling besar berada di tahun 2022. Hal tersebut

menyesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 98 tahun 2022 bahwa bantuan langsung tunai minimal 40% dari dana desa. Berangkat dari kebijakan BLT DD tersebut dan anggaran dana desa untuk BLT cukup besar menjadikan tingkat kemiskinan masyarakat Desa Sukanegeri Jaya menjadi meningkat, dikarenakan masyarakat yang telah menerima BLT DD menjadi bergantung dengan bantuan tersebut dan malas untuk bekerja. Bahkan, semakin banyak masyarakat desa yang ingin dianggap sebagai keluarga miskin supaya mendapatkan bantuan tersebut.

Penanggulangan kemiskinan sebagai tindakan yang diciptakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan penduduk yang mengalami kemiskinan. Akan tetapi, program penanggulangan kemiskinan di Indonesia masih terdapat kek dikarenakan penanggulangan tersebut hanya mengarahkan fokus pada program berupa pemberian bantuan sosial yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah. Penanggulangan kemiskinan dengan cara tersebut hanya memperburuk moral dan perilaku masyarakat. Selain itu, kekurangan dari program penanggulangan kemiskinan dikarenakan berbagai pihak penanggulangan kurang memahami penyebab dari permasalahan kemiskinan itu sendiri. Oleh karena itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem salah satu langkah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem adalah melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat (Maria et al., 2023).

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dimana setiap elemen masyarakat berada dalam posisi setara, berkembang bersama. Setiap elemen perlu memiliki rasa untuk memahami serta menghargai urgensi dan perbedaan yang ada. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan utama, yaitu mendorong desa dalam melaksanakan kegiatan bersama sebagai sebuah kesatuan yang menyertakan seluruh pemangku kepentingan, seperti pemerintah desa, masyarakat desa, atau pun pihak lain guna meningkatkan partisipasi dan daya guna masyarakat dalam proses pembangunan, penyusunan rancangan pembangunan yang memihak pada golongan masyarakat miskin, serta mengembangkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia. Dengan demikian,

pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan berbagai program atau kegiatan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat di dalamnya. Program-program pemberdayaan masyarakat yang akan diciptakan harus ditunjang dengan fasilitas, seperti anggaran biaya. Fasilitas tersebut bisa didapatkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau pun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Utami, 2019).

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari dana transfer ke daerah diperuntukkan bagi Desa asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan pemberian dana desa guna mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat serta kemasyarakatan. Alokasi dana desa dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota yang telah dihitung berdasarkan jumlah desa. Selain itu, pemberian dana desa berlandaskan berkeadilan, yaitu alokasi dasar dan alokasi yang dihitung melalui jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota. Dengan demikian, dana desa tidak hanya diutamakan untuk pembangunan infrastruktur desa saja, namun ditujukan juga guna mengembangkan program pemberdayaan masyarakat desa (Raharjo, 2020).

Tabel 2. Rincian Dana Desa Desa Sukanegeri Jaya tahun 2020-2024

No	Tahun	Jumlah Dana (Rp)
1.	2020	739.740.000
2.	2021	671.130.000
3.	2022	650.569.000
4.	2023	702.999.000
5	2024	1.454.642.466

Sumber: Sistem Informasi Desa, 2024

Sebagai desa yang mendapatkan dana desa dari pusat, Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya memiliki upaya yang sistematis, dan lebih mengutamakan keinginan dibandingkan kebutuhan dalam menanggulangi kemiskinan. Keinginan

yang dimaksud Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya adalah keinginan tercapainya visi misi, yakni tercapainya masyarakat yang mandiri, demokratis dan handal sebagai Sumber Daya Manusia (SDM), serta dapat menjadi pusat keunggulan disegala bidang guna mengingkatkan perekonomian. Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya menginginkan supaya masyarakat tidak hanya menerima kebutuhan saja, melainkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, serta menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Melalui dana desa tersebut Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya membentuk pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menanggulangi kemiskinan, seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diberikan beberapa pelatihan untuk meningkatkan perekonomian keluarga dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan perekonomian desa serta memajukan usaha masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menitik beratkan pada kemiskinan dan penanggulangannya di Desa Sukanegeri Jaya, pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, dan Desa Sukanegeri Jaya merupakan desa yang mendapatkan dana desa setiap tahunnya dan dapat mengelolanya dengan baik. Dengan persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Pemerintah Desa dalam Menanggulangi Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa (Studi Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah, maka didapatkan rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa yang diperoleh di Desa Sukanegeri Jaya?
2. Apakah terdapat kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya?

3. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dibentuk pemerintah desa melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa yang diperoleh di Desa Sukanegeri Jaya.
2. Untuk mengetahui kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya.
3. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dibentuk pemerintah desa melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat secara teoritis dan praktis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai informasi, dan dapat dijadikan referensi pengembangan dalam bidang ilmu sosiologi politik dan bidang ilmu sosiologi pembangunan. Pada sosiologi politik penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan melalui dana desa yang diperoleh dari pusat. Sementara, pada sosiologi pembangunan penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang menanggulangi kemiskinan dengan cara membangun dan meningkatkan kapasitas masyarakat desa melalui program pemberdayaan masyarakat yang dibentuk oleh pemerintah desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi akademisi untuk menjadi bahan kajian atau bahan pembelajaran dari sebuah pengalaman untuk mengatasi problematika upaya penganggulangan kemiskinan. Serta penelitian ini

diharapkan mampu memberikan sumbangsih pada Kementrian Dalam Negeri, terkhususnya pada Balai Pemerintahan Desa di Lampung, subbagian Keuangan dan Asset Desa terkait upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, faktor kendala, dan dampak yang dirasakan masyarakat. Serta dapat menjadi bahan monitoring dan evaluasi pada Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Sistem Pemerintahan Desa

2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tarkait pemerintahan desa telah ditetapkan pada 1 Desember 1979. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintahan desa adalah pengelolaan dan pengurusan pemerintahan yang dijalankan oleh pemerintahan desa ataupun pemerintah kelurahan. Elemen yang termasuk dalam pemerintahan, seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan (kaur), badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan (Hendardi, 2017).

2.1.2 Elemen-elemen Pemerintahan Desa

a. Kepala Desa

Kepala desa sebagai seseorang yang memimpin sebuah desa. Kepala desa yang ditentukan oleh rakyat secara langsung dengan cara pemilihan kepala desa (Pilkades). Setelah melalui pilkades, kepala desa dan sekertaris desa dilantik dan diberhentikan oleh Bupati atau Wali kota sebagai Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur sebagai kepala daerah tingkat I. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 39 Ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa masa kedudukan seorang kepala desa untuk memimpin sebuah desa adalah selama 6 (enam) tahun. Selain itu, kepala desa dapat menjabat sebanyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara teratur atau tidak secara teratur. Apabila dihitung, maka seorang kepala desa dapat menjabat di desa paling lama 18 (delapan belas) tahun atau sebanyak tiga kali masa jabatan (Hendardi, 2017).

Kepala desa memiliki kekuasaan untuk mengelola dan mengurus kebutuhan masyarakatnya. Pada proses penyelenggaraan pertanggung jawaban kepala

desa akan dilaporkan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kepala desa harus menyerahkan keterangan laporan pertanggung jawaban tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa termasuk sebagai perangkat desa yang memiliki kewajiban, yaitu membantu Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa sekretaris desa memiliki kedudukan sebagai elemen pimpinan sekretariat desa yang melaksanakan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Sekretaris desa sering disebut dengan carik. Sekretaris desa ditempati dari anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c. Kepala Urusan (Kaur)

Kepala urusan (Kaur) termasuk sebagai aparat desa yang menangani bidang tertentu. Kepala urusan bertugas membantu seorang kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Kepala urusan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan kepala urusan keuangan.

d. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah salah satu elemen yang membantu kepala desa dalam melaksanakan tugasnya. Anggota BPD terbagi atas ketua Rukun Warga (RW), ketua adat, kelompok profesi, dan tokoh atau pemuka agama. Anggota-anggota BPD tersebut dapat ditentukan atau diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan selanjutnya.

e. Lembaga Kemasyarakatan

Lembaga kemasyarakatan desa adalah tempat partisipasi masyarakat dalam mendukung pemerintah desa dalam perencanaan, pengawasan dan pembangunan, dan meningkatkan pelayanan masyarakat. Lembaga-lembaga sosial yang berada di masyarakat, seperti Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), dan lainnya.

2.2 Tinjauan Kemiskinan

2.2.1 Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah sebuah keadaan kekurangan kepunyaan dan kecilnya pendapatan. Secara spesifik, kemiskinan merupakan sebuah keadaan yang tidak dapat mencukupi kebutuhan pokok, seperti sandang, pangan, dan papan. Salah satu definisi kemiskinan yang menjelaskan keadaan kekurangan tersebut adalah definisi kemiskinan yang dijelaskan BPS. Menurut BPS, kemiskinan dipandang sebagai kondisi tidak kesanggupan seseorang dalam mencukupi kebutuhan pokok sekurang-kurangnya untuk hidup yang layak. Dimensi kemiskinan mengandung beberapa unsur yang pelik, para ahli mengklasifikasikannya dalam tiga jenis kemiskinan (Bhinadi, 2017), sebagai berikut:

- 1) Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang hadir karena kualitas SDA dan SDM yang rendah. Keadaan alam dan sumber daya manusia yang rendah membuat kesempatan produksi juga rendah. Terutama pada sektor pertanian, penyebab kemiskinan adalah kualitas lahan dan iklim yang kurang menunjang kegiatan pertanian. Pada beberapa wilayah di Indonesia, lebih banyak ditemui pada Pulau Jawa. Selain di Pulau Jawa sumber daya alam yang subur jumlahnya terbatas. Sehingga para petani hanya dapat menanami lahan saat ada hujan dan mentidakibatkan hasil produksi hanya dapat dipanen sekali dalam satu tahun.
- 2) Kemiskinan kultural merupakan kemiskinan berkaitan dengan perilaku seseorang atau kelompok yang ada dalam masyarakat yang tidak berupaya membenahi kehidupannya, jika pun ada upaya adalah bantuan dari pihak lain. Faktor lain dari kemiskinan ini adalah karena sistem tradisi masyarakat. Misalnya, sistem warisan yang membentuk pembagian lahan menyebabkan kepemilikan lahan per keluarga semakin lama menjadi semakin kecil.
- 3) Kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang terjadi karena sistem kelembagaan atau struktur sosial dalam masyarakat. Berbagai kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kerap membuat sebagian golongan masyarakat menghadapi kemiskinan. Kemiskinan tersebut karena ada batasan, bahkan tidak mendapatkan akses terhadap sumber daya serta pembangunan yang ada. Kemiskinan ini mentidakibatkan golongan masyarakat tertentu tertahan dalam

kondisi kemiskinan, bahkan harus dialami secara turun temurun. Kemiskinan struktural hanya dapat ditanggulangi melalui proses perubahan struktur dalam masyarakat secara mendasar.

Kemiskinan yang dirasakan seseorang atau rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari pencapaian tingkat kesejahteraannya. Munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat sebagai tanda dari tidak terwujudnya kesejahteraan individu atau rumah tangga. Tingkat kesejahteraan tersebut dapat dilihat melalui beberapa pendekatan yang dapat digunakan (Bhinadi, 2017), sebagai berikut:

- 1) Pendekatan absolut, yaitu pendekatan yang melihat pada batas minimum yang harus dicapai untuk memenuhi kebutuhan minimum suatu keluarga. Suatu keluarga termasuk miskin jika tidak memiliki penghasilan atau tidak memenuhi batas minimum yang dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhannya. Dengan pendekatan tersebut akan dapat diketahui jumlah keluarga miskin. Melalui batas minimum yang sama maka akan dapat diperbandingkan satu daerah dengan daerah lainnya. Pendekatan ini memiliki kelemahan, yaitu pada kenyataan bahwa kebutuhan setiap keluarga tidak akan sama, karena tergantung pada waktu dan tempat. Kemiskinan berkaitan dengan keadaan-keadaan dimasyarakatnya. Akan tetapi, pendekatan ini masih banyak diterapkan, khususnya terkait dengan perbandingan jumlah penduduk miskin.
- 2) Pendekatan relatif, yaitu pendekatan yang membandingkan antara pendapatan seseorang atau rumah tangga dengan rata-rata pendapatan populasi. Pendekatan ini lebih melihat pada ketidaksetaraan pendapatan. Selama ketidaksetaraan pendapatan ada maka kemiskinan akan tetap ada. Pendekatan ini sudah mendukung bahwa kemiskinan tidak akan sama di semua tempat, tetapi pendekatan ini justru tidak dapat menunjukkan seberapa buruk atau seberapa baik orang mendistribusikan pendapatan dalam kehidupan nyata.
- 3) Pendekatan kebutuhan dasar adalah pendekatan yang dikemukakan oleh Townsend. Pendekatan ini memfokuskan pada dua unsur penting, yakni pertama, kemiskinan diartikan sebagai kondisi pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan subsisten akan pangan, papan, pakaian, dan barang-

barang rumah tangga tertentu. Kedua, pendapatan tersebut juga tidak dapat mencukupi dalam membayar jasa-jasa penting lainnya, seperti air minum yang bersih dan aman, sanitasi, transportasi umum, pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Pendekatan ini lebih lengkap daripada dua pendekatan sebelumnya, karena lebih memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan, dimana hal tersebut akan berbeda tergantung pada tempat dan waktu.

2.2.2 Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan sebuah alat ukur yang dapat dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan yang dirasakan seseorang atau sekelompok. Indikator kemiskinan yang digunakan mengikuti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Indikator kemiskinan yang dimaksud adalah :

- 1) Keterbatasan pangan adalah ukuran yang melihat kecukupan pangan dan mutu pangan yang dikonsumsi. Ukuran indikator ini adalah stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan jikari penduduk miskin, dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu.
- 2) Keterbatasan akses kesehatan adalah ukuran yang melihat keterbatasan akses kesehatan dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Keterbatasan akses kesehatan dilihat dari kesulitan memperoleh layanan kesehatan dasar, minimnya mutu layanan kesehatan dasar, terbatasnya layanan reproduksi, sulitnya menjangkau fasilitas layanan kesehatan, dan biaya pengobatan dan perawatan yang tergolong mahal. Kelompok miskin umumnya lebih memanfaatkan pelayanan di puskesmas daripada dengan rumah sakit.
- 3) Keterbatasan akses pendidikan merupakan indikator yang diukur dari mutu pendidikan yang ada, mahalnya biaya pendidikan, minimnya fasilitas pendidikan, dan kurangnya kesempatan memperoleh pendidikan.
- 4) Keterbatasan akses pada pekerjaan merupakan indikator yang diukur dari keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha, rendahnya perlindungan terhadap asset usaha, upah yang bervariasi, serta rendahnya perlindungan kerja terutama untuk pekerja anak dan pekerja perempuan.

- 5) Keterbatasan akses terhadap layanan perumahan dan sanitasi adalah indikator yang diukur dari kesulitan mempunyai rumah yang sehat dan layak ditempati, dan lingkungan rumah yang sehat dan layak.
- 6) Keterbatasan akses terhadap air bersih merupakan indikator yang diukur dari sulitnya mendapatkan air bersih, minimnya penguasaan sumber air, dan kurangnya mutu sumber air.
- 7) Keterbatasan akses terhadap tanah merupakan indikator yang diukur dari struktur kepemilikan dan penguasaan tanah, ketidaktentuan kepemilikan dan penguasaan tanah. Akses terhadap tanah ini sebagai permasalahan yang mempengaruhi kehidupan rumah tangga.
- 8) Keterbatasan akses terhadap sumber daya alam merupakan indikator yang diukur dari buruknya keadaan lingkungan hidup, rendahnya sumber daya alam. Indikator ini berkaitan dengan pendapatan yang berasal dari sumber daya alam, seperti daerah perdesaan, daerah pesisir, dan daerah pertambangan.
- 9) Tidak adanya jaminan rasa aman adalah indikator yang berhubungan dengan tidak terjaminnya keamanan dalam menjalani kehidupan, baik sosial atau pun ekonomi.
- 10) Keterbatasan akses untuk partisipasi merupakan indikator yang diukur melalui minimnya keterlibatan dalam pengambilan kebijakan.
- 11) Besarnya beban kependudukan adalah indikator ini berkaitan dengan besarnya tanggungan keluarga dan tekanan hidup.

Beberapa indikator oleh Bappenas tersebut meliputi semua aspek yang dapat dipakai dalam mengenali adanya kemiskinan. Tetapi, indikator-indikator tersebut masih sangat umum dan diperlukan deskripsi yang lebih rinci yang bisa dilihat secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Indikator yang dijelaskan oleh Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) jauh lebih spesifik untuk melihat kondisi kemiskinan yang dirasakan masyarakat. Keluarga miskin menurut komite ini adalah keluarga yang tidak mampu memenuhi satu atau lebih indikator berikut ini (Bhinadi, 2017), yaitu :

- 1) Paling sedikit, hanya sekali dalam seminggu makan daging, ikan, dan telur.

- 2) Hanya sekali dalam setahun seluruh anggota keluarga mendapatkan paling kurang satu setel pakaian baru.
- 3) Lantai rumah paling kurang 8 m^2 per penghuni.

Sementara, kategori keluarga miskin sekali, yaitu jika keluarga tidak sanggup mencukupi satu atau lebih indikator berikut ini :

- 1) Seluruh anggota keluarga umumnya makan dua kali atau lebih dalam sehari.
- 2) Mempunyai pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan berpergian.
- 3) Bagian lantai terluas bukan dari tanah.

Pengukuran tingkat kemiskinan di Indonesia secara resmi ditetapkan oleh BPS pada tahun 1984. Metode penghitungan kemiskinan dilaksanakan melalui pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu komponen kebutuhan dasar terdiri makanan dan bukan makanan yang disusun menurut daerah perkotaan dan pedesaan melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SuSeNas). Kemasian, pendekatan rata-rata per kapita yang diberlakukan dalam penghitungan kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran minimum makanan yang setara dengan 2100 jikari per kapita per bulan ditambah pengeluaran minimum bukan makanan. Data kemiskinan yang dihitung oleh BPS merupakan data makro yang perkiraan penduduk miskin di Indonesia yang hanya dapat ditunjukkan sampai tingkat provinsi dan kabupaten. Sedangkan, Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE-05) dilaksanakan dengan tujuan memperoleh data kemiskinan mikro berupa direktori rumah tangga miskin yang isinya mencakup nama kepala rumah tangga miskin dan alamat tempat tinggal mereka.

2.2.3 Penanggulangan Kemiskinan

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha serta masyarakat guna menurunkan jumlah penduduk miskin. Program penanggulangan kemiskinan merupakan tindakan

yang diciptakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin (Badan Pemeriksa Keuangan, 2018). Menurut Soegijoko, upaya penanggulangan kemiskinan adalah sebuah pembangunan yang disusun untuk mengetaskan tiga permasalahan utama, yaitu pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan (Bhinadi, 2017).

a. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif mementingkan partisipasi berbagai pihak kepentingan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha (sektor swasta) dan masyarakat adalah bagian-bagian yang memiliki kewajiban terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemerintah telah melakukan penanggulangan kemiskinan dengan berbagai program untuk mengupayakan kecukupan kebutuhan dasar warga negara secara layak, mengembangkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, meningkatkan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melakukan percepatan pembangunan daerah yang terpinggirkan dalam upaya menggapai masyarakat Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Tetapi, seluruh upaya tersebut belum optimal apabila tidak ada dukungan dari para pihak kepentingan lainnya. Dalam mendukung penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan menciptakan percepatan penanggulangan kemiskinan, maka disusun empat strategi utama (Josep, 2018), yaitu:

- 1) Memperbaiki program perlindungan sosial. Strategi ini bertujuan untuk membantu individu dan masyarakat mengalami goncangan-goncangan (*shocks*) kehidupan, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, diberhentikan dari pekerjaan, terjadi bencana alam, dan lainnya. Sistem perlindungan sosial yang berhasil akan mencegah supaya seseorang atau masyarakat yang mengalami goncangan tidak menjadi jatuh miskin. Dengan begitu, untuk mengatasi kemungkinan orang jatuh miskin lebih banyak, perlu dibentuk suatu program bantuan sosial untuk mejaga masyarakat yang tidak miskin supaya tidak menjadi miskin dan masyarakat yang sudah miskin supaya tidak menjadi lebih miskin.

- 2) Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar. Strategi kedua dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar. Akses pelayanan dasar tersebut, seperti pelayanan pendidikan, kesehatan, air bersih dan sanitasi, serta pangan dan gizi. Sehingga membantu mengecilkan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat miskin.
- 3) Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Pentingnya pelaksana strategi ini karena menilai bahwa kemiskinan juga terjadi karena ketidakadilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Sehingga pertumbuhan tidak tersebar secara merata pada semua elemen masyarakat. Seluruh program penanggulangan kemiskinan dibentuk oleh pemerintah (pusat), demikian pula dengan penanganannya. Petunjuk penyelenggaraan dan petunjuk teknis implementasi program selalu dibentuk seragam tanpa mengkaji karakteristik masyarakat miskin pada setiap daerah. Sehingga program yang dibentuk kerap tidak memiliki keterkaitan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat miskin pada suatu daerah. Dengan demikian, upaya secara menyeluruh didukung dengan pemberdayaan masyarakat miskin menjadi sebuah strategi utama penanggulangan kemiskinan.
- 4) Pembangunan inklusif. Pembangunan yang inklusif yang dijelaskan sebagai pembangunan yang memperlibatkan serta memberi manfaat kepada masyarakat. Partisipasi menjadi kunci dalam penyelenggaraan pembangunan. Berdasarkan fakta pada beberapa negara menggambarkan bahwa kemiskinan hanya dapat berkurang apabila perekonomian berkembang secara dinamis. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan kemungkinan dapat terjadi peningkatan angka kemiskinan. Pertumbuhan harus dapat membentuk lapangan kerja produktif dalam jumlah besar. Selain itu, diharapkan memiliki pengaruh yang luas dalam meningkatkan pendapatan mayoritas penduduk, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu, diperlukan terbentuknya iklim usaha yang kondusif di dalam negeri. Pembangunan yang inklusif juga perlu diperhatikan dalam konteks kewilayahan. Pada daerah di

Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan dengan sumber daya dan komoditi unggulan yang bermacam-macam. Perekonomian daerah tersebut akan membentuk karakteristik perekonomian nasional. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting dalam meningkatkan ekonomi domestik.

b. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Desa

Kemiskinan sebagai permasalahan yang sangat menghantui penyelengaraan pembangunan Indonesia selama ini, baik di tingkat nasional hingga daerah khususnya pada pedesaan. Berbagai upaya telah dan lalu diupayakan dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Untuk strategi dan kebijakan alternatif menanggulangi kemiskinan di desa dapat dilaksanakan dengan cara (Josep, 2018), yaitu:

- 1) Menyerahkan kesempatan luas kepada masyarakat desa mendapatkan layanan pendidikan memadai dan gratis. Pemerintah perlu meningkatkan sistem pendidikan nasional yang memfokuskan pada orang miskin. Pendidikan yang diajukan di Indonesia lebih mahal dan sulit diperoleh orang miskin. Sehingga kebanyakan memilih tidak menyekolahkan anaknya, dikarenakan beban biaya pendidikan tidak seimbang kondisi keuangan mereka.
- 2) Mendistribusikan ulang lahan dan modal pertanian yang seimbang. Ketidakadilan hak lahan pertanian, memperluas kemiskinan antar masyarakat di pedesaan. Kebanyakan tanah pertanian dimiliki pengepul lokal dan tuan tanah. Sehingga tanah pertanian tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat desa yang mempunyai tanah dan modal pertanian terbatas.
- 3) Memajukan perkembangan investasi pertanian dan pertambangan ke daerah pedesaan. Pembukaan investasi pertanian dan pertambangan dapat menciptakan kesempatan kerja kepada masyarakat desa. Sehingga pendapatan masyarakat akan mengalami peningkatan dan terjadi perubahan kesejahteraan hidup.
- 4) Memberikan kesempatan luas kepada masyarakat desa mendapatkan kredit usaha yang mudah. Sistem kredit saat ini, seperti Kredit Usaha Rakyat

(KUR) masih kurang memberikan kemudahan usaha bagi masyarakat desa dan sering salah sasaran. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan baru yang memadai dalam jaminan kredit usaha untuk masyarakat desa.

- 5) Mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan papan masyarakat desa. Dapat dilaksanakan dengan membuat lumbung desa yang memberikan kesempatan sama kepada masyarakat, yaitu mendapatkan sumber kebutuhan secara terorganisir.
- 6) Memberitahukan sistem pertanian modern dengan teknologi baru yang menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam mencari sumber pendapatan yang memadai. Memperbanyak teknologi pertanian dan diserahkan secara gratis kepada petani untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mempermudah dalam mencukupi kebutuhan hidup mereka.
- 7) Meningkatkan jaminan kesehatan kepada mayarakat melalui sistem layanan kesehatan gratis, membangun lebih banyak PUSKESMAS dan unit layanan kesehatan untuk masyarakat desa.
- 8) Meningkatkan jaminan asuransi dan jaminan sosial terhadap masyarakat desa. Jaminan ini dapat mengembangkan kualitas hidup masyarakat miskin dan memberikan smemangat hidup yang lebih berarti. Walaupun sistem yang terdapat saat ini ditujukam bagi seluruh rakyat Indonesia, tetapi pelaksanaannya tetap menyulitkan masyarakat miskin, khususnya di desa yang kurang akan pengetahuan sistem jaminan. Dengan begitu, pemerintah bertanggung jawab memberikan jaminan asuransi memadai kepada masyarakat miskin.
- 9) Memperkuuh komitmen eksekutif dan legislatif untuk merevisi tatanan pemerintahan. Tatanan pemerintahan saat ini membuat kebebasan terjadinya praktik korupsi dalam seluruh pemerintahan. Perbaikan tatanan pemerintahan, menjadi kunci program penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin.
- 10) Mendukung agenda pembangunan daerah, yaitu pemberantasan kemiskinan menjadi skala prioritas utama, membangun kesadaran kelompok agar memahami kemiskinan sebagai musuh bersama, dan

mengembangkan partisipasi seluruh pihak untuk memberantas kemiskinan.

2.3 Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 Pengertian Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan yang diharapkan oleh individu, kelompok, dan masyarakat luas supaya mempunyai kemampuan dan dapat mengontrol lingkungannya. Pemberdayaan dapat didefinisikan juga sebagai pemberi daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*). Konsep pemberdayaan muncul karena terdapat realitas ketidakberdayaan (*disempowerment*). Pihak yang tidak berdaya adalah masyarakat yang tidak memiliki daya atau kehilangan daya. Daya yang dimaksud adalah kekuatan sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tidak berdaya adalah masyarakat yang kehilangan atau pun tidak memiliki kekuatan. Beberapa ketidakberdayaan yang dialami masyarakat desa (Erowati, 2021), yakni:

- 1) Permasalahan kesejahteraan, kesejahteraan masyarakat desa tergolong rendah.
- 2) Permasalahan rendahnya akses terhadap sumber daya.
- 3) Permasalahan kesadaran. Masyarakat desa lebih percaya keadaan mereka berhubungan dengan nasib, kurangnya kemampuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan mentidakibatkan banyak permasalahan yang tidak bisa di atasi.
- 4) Permasalahan partisipasi. Keterlibatan masyarakat desa dalam penentuan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan mereka ditentukan oleh golongan elit. Sebagian kalangan memandang permasalah ini muncul karena minimnya kapasitas masyarakat.

Ketidakberdayaan yang dialami masyarakat desa membutuhkan suatu solusi yang harus dilakukan oleh masyarakat, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dimana setiap elemen masyarakat berada dalam posisi setara, berkembang

bersama. Setiap elemen perlu saling memahami dan menghargai urgensi dan perbedaan yang ada. Pemberdayaan diciptakan sebagai wadah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pengetahuan, segala tindakan, keahlian, kecakapan, kesadaran, dan memanfaatkan sumber daya melalui penentuan kebijakan, program, kegiatan, serta pendampingan yang sepadan dengan akar masalah dan kebutuhan utama masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk mengubah kesadaran rakyat dan mendekatkan masyarakat dengan akses untuk memperbaiki kehidupannya. Sebuah perubahan kesadaran berarti sebagai tindakan dalam meningkatkan pendidikan politik untuk meningkatkan wacana alternatif sehingga dominasi atau bahkan hegemoni negara bisa di atasi. Usaha pendekatan masyarakat terhadap akses untuk perbaikan kehidupan dengan membagikan ulang sumber-sumber ekonomi. Dengan begitu, langkah pemberdayaan tidak mungkin dilaksanakan apabila tidak mencakup langkah pengorganisasian masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan, yaitu:

- 1) Menguatkan masyarakat untuk mandiri (otonom) mengatur diri. Sehingga masyarakat akan mudah menghadapi berbagai kondisi sulit serta mampu menolak berbagai kemungkinan yang merugikan.
- 2) Menguatkan ekspresi aspirasi dan berusaha memperjuangkannya
- 3) Menguatkan penyelesaian permasalahan dalam dinamika pembangunan dan menjadi acuan adanya kepercayaan kepada masyarakat bahwa masyarakat tidak perlu dardikan sebagai sumber kebodohan, namun subyek pembangunan yang juga mempunyai keahlian.

2.3.2 Indikator Pemberdayaan Masyarakat

UNICEF mengemukakan 5 (lima) dimensi sebagai standar keberhasilan pemberdayaan masyarakat, terdiri dari kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Kelima dimensi tersebut merupakan bagian-bagian analisis yang bersifat dinamis, satu sama lain memiliki keterkaitan secara sinergis saling menguatkan dan melengkapi. Uraian lebih rinci dari beberapa dimensi tersebut (Erowati, 2021), sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan adalah tingkat kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.
- 2) Akses adalah dimensi yang berkaitan dalam kesetaraan untuk akses terhadap sumber daya dan manfaat yang diperoleh dari adanya sumber daya. Tidak terdapatnya akses adalah sebuah penghambat untuk terlaksanakannya peningkatan kesejahteraan. Ketimpangan pada dimensi ini terjadi karena tidak ditemukannya kesetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada pada kelas lebih tinggi daripada mereka dari kelas rendah, yang berkuasa dan dikuasai, pusat dan pinggiran. Sumber daya tersebut, seperti waktu, tenaga, lahan, kredit, informasi, keterampilan, dan lainnya.
- 3) Kesadaran kritis, yaitu menjelaskan bahwa ketimpangan yang dialami masyarakat dalam kehidupannya bukanlah bentuk alamiah yang terjadi sejak kapan pun atau hanya memang kehendak Tuhan, tetapi bersifat struktural yang terjadi karena dari adanya diskriminasi yang melembaga. Keberdayaan masyarakat dalam dimensi ini merupakan kesadaran masyarakat bahwa ketimpangan tersebut adalah bentukan sosial yang dapat dan harus diperbaiki.
- 4) Partisipasi merupakan masyarakat yang terkait dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Dengan begitu, berarti masyarakat ikut serta dalam proses penentuan keputusan, maka kepentingan mereka tidak tertinggal.
- 5) Kontrol merupakan keseluruhan lapisan masyarakat turut mempunyai kendali terhadap sumber daya yang ada. Melalui sumber daya yang ada, seluruh elemen masyarakat dapat mencukupi hak-haknya, bukan hanya sekumpulan kecil orang yang berkuasa saja yang merasakan sumber daya, namun seluruh elemen masyarakat dapat mengendalikan serta mengatur sumber daya yang dimiliki.

2.3.3 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan dapat dilaksanakan secara individual, namun pada akhirnya strategi ini akan tetap berhubungan dengan kelompok. Maksud dari hal tersebut adalah mengaitkan masyarakat dengan sumber atau sistem lain diluar

dirinya. Pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga tingkat pemberdayaan (Erowati, 2021), yaitu :

- 1) Tingkat mikro merupakan pemberdayaan yang dilaksanakan terhadap masyarakat secara individu dengan cara bimbingan, konseling, dan manajemen stres. Tingkatan ini bertujuan untuk membina dan melatih dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Tingkatan ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
- 2) Tingkat mezzo merupakan pemberdayaan yang dilaksanakan terhadap sekelompok masyarakat. Pemberdayaan dilaksanakan melalui kelompok sebagai media intervensi. Pendidikan, pelatihan, dan dinamika kelompok yang kerap digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.
- 3) Tingkat makro merupakan pendekatan yang kerap disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan ditujukan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik merupakan beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang individu atau kelompok sebagai pihak yang memiliki kompetensi untuk memahami kondisi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

2.4 Tinjauan Dana Desa

2.4.1 Pengertian Dana Desa

Dana Desa merupakan dana yang asalnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditujukan untuk desa. Pengalokasian dana desa dikirim melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota yang telah dihitung berdasarkan jumlah desa. Tujuan pemberian dana desa yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah tercantum juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 19 Ayat 1, yakni digunakan untuk menanggung penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan, memajukan kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat. Dengan demikian, dana desa yang berumber dari pusat tidak hanya diutamakan untuk pembangunan infrastruktur desa, namun ditujukan juga untuk pengembangan program pemberdayaan masyarakat desa (Oktara, 2019).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dalam ayat pasal yang telah diamandemen pada Peraturan Pemerintah Nomor 168 tahun 2014 ke 11 ayat 2 yang sudah ditinjau dan direncanakan dalam pengalokasian dana desa menjelaskan bahwa dana desa dialokasikan secara berkeadilan (Erowati, 2021), yaitu :

- 1) Alokasi dasar merupakan alokasi minimal dana desa yang harus diterima oleh kabupaten atau kota berdasarkan perhitungan tertentu, seperti perhitungan yang dibagi secara merata untuk setiap desa.
- 2) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten atau kota. Tingkat kesulitan geografis desa dapat dilihat melalui indeks kemahalan konstruksi. Sedangkan, data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta indeks kemahalan konstruksi berasal dari kementerian yang bertanggung jawab atau pun lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang statistik.

2.4.2 Prinsip-Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 3 menyatakan bahwa prioritas penggunaan Dana Desa yang berlandaskan prinsip-prinsip (Novianto, 2019), yaitu:

- 1) Prinsip keadilan merupakan prinsip yang memprioritaskan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa diskriminatif.
- 2) Prinsip kebutuhan prioritas merupakan prinsip yang mengutamakan kepentingan Desa yang lebih genting, lebih dibutuhkan dan berkaitan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.

- 3) Prinsip terfokus merupakan prinsip yang mementingkan pilihan penggunaan dana desa pada 3 (tiga) hingga dengan 5 (lima) jenis kegiatan sesuai dengan kebutuhan menurut prioritas nasional, daerah provinsi, daerah kabupaten atau kota dan desa, dan tidak dilaksanakan praktik penggunaan dana desa yang dibagi rata.
- 4) Prinsip kewenangan desa, yaitu prinsip yang mementingkan kewenangan hak asal-usul dan kekuasaan lokal berskala desa.
- 5) Prinsip partisipatif merupakan prinsip yang mengedepankan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat desa.
- 6) Prinsip swakelola merupakan prinsip yang memfokuskan pada kemandirian desa dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan desa yang disokong dana desa.
- 7) Prinsip berdikari merupakan prinsip yang memfokuskan pada pemanfaatan dana desa dengan memanfaatkan sumber daya desa untuk membayar kegiatan pembangunan yang dijalankan dari, oleh dan untuk masyarakat desa sehingga dana desa berputar secara berkepanjangan di wilayah desa dan daerah kabupaten atau kota.
- 8) Prinsip berbasis sumber daya desa merupakan prinsip yang memfokuskan pada pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terdapat di Desa dalam penyelenggara pembangunan yang disokong oleh Dana Desa.
- 9) Prinsip tipologi desa merupakan prinsip yang memperhitungkan kondisi dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang memiliki ciri khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

2.4.3 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Prioritas penggunaan dana desa telah disusun berdasarkan Pasal 4 BAB III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Dalam peraturan tersebut dinyatakan dalam beberapa ayat bahwa prioritas penggunaan dana desa (Novianto, 2019), yaitu:

- 1) Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mentidakomodasi penyelenggaraan program dan kegiatan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- 2) Prioritas penggunaan dana desa sesuai yang dituju dalam ayat 1 bahwa dana desa dapat dipakai untuk mentidakomodasi penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- 3) Prioritas penggunaan dana desa sesuai yang dituju dalam ayat 1 dan ayat 2, diharapkan dapat menurunkan faedah sebesar-besarnya untuk masyarakat desa dalam meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan sekaligus mengembangkan pelayanan publik di tingkat Desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk mentidakomodasi pelaksanaan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan desa untuk dapat menaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sekaligus dapat menanggulangi kemiskinan di desa. Pembangunan desa yang dimaksud merupakan upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat desa. Perumusan pembangunan desa merupakan proses tahan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan menyangkutkan Badan Permusyawaratan Desa dan elemen partisipasi masyarakat. Hal tersebut untuk pendayagunaan dan pengalokasian sumber daya desa sebagai rancangan menggapai tujuan pembangunan desa. Sementara, pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan kesadaran sekaligus pemanfaatan sumber daya dengan cara pengesahan kebijakan, penciptaan program, kegiatan, dan pendampingan yang selaras dengan inti permasalahan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa (Kurniawan dan Wea, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Pasal 22, menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan program yang diakomodasi dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang telah ditentukan oleh bupati atau

wali kota. Selain itu, penyelenggaraan program yang diakomodasi dana desa diprioritasakan dilaksanakan secara swakelola melalui sumber daya atau bahan baku lokal serta diusahakan lebih banyak menggunakan tenaga kerja dari masyarakat. Dan, kepala desa memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan dana desa, sedangkan untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat mendampingi kepala desa dalam mengelola dana desa. Untuk pendampingan tersebut dilakukan dengan mengikuti pedoman yang ditentukan oleh menteri teknis yang berkaitan (Kurniawan dan Wea, 2022).

2.5 Landasan Teori Struktural Fungsional oleh Talcott Parsons

Teori struktural fungsional adalah sebuah perspektif dalam sosiologi dan antropologi yang berusaha memaknakan tentang masyarakat sebagai suatu struktur dengan elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Teori struktural fungsional merupakan sebagai suatu landasan teori paling besar pengaruhnya dalam ilmu sosial saat ini. Para tokoh yang melahirkan teori ini adalah Auguste Comte, Emile Dukheim, dan Herbert Spencer. Struktural fungsional merupakan hasil pengaruh dari ilmu biologi yang memandang bahwa masyarakat sebagai organisme biologis, yakni tersusun dari organ-organ yang saling ketergantungan untuk tetap bertahan hidup (Niko dan Yulasteriyani, 2020).

Dalam teori struktural fungsional masyarakat sebagai sebuah sistem sosial yang terbentuk atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubungan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Teori struktural fungsional menganalisis perilaku manusia dalam lingkup organisasi (masyarakat) dan menganalisis perilaku tersebut dapat mempertahankan atau tidak sebuah keseimbangan dalam organisasi atau masyarakat. Perubahan yang dialami pada satu bagian akan memberikan perubahan juga untuk bagian yang lain. Akan tetapi, jika tidak terdapat fungsional akan menyebabkan struktur tersebut tidak ada atau hilang dengan sendirinya. Teori struktural fungsionalisme menilai masyarakat sebagai sebuah hal yang stabil yang condong pada keseimbangan. Dengan begitu, tidak terdapat satu pun unsur

sosial yang dapat bertumpu sendiri sehingga setiap unsur mempunyai hubungan yang saling bergantung.

Talcott Parsons merupakan tokoh struktural fungsionalisme yang terkemuka hingga kini. Parsons mempublikasikan karyanya pada tahun 1937 yang berjudul *Structure of Social Action*. Parsons diketahui sebagai tokoh struktural fungsional yang menitikberatkan terhadap permasalahan sistem tindakan sosial yang dijalani oleh setiap manusia dalam melakukan kehidupan bermasyarakat. Parsons dalam melahirkan teorinya menggunakan sebuah rangkaian alat tujuan yang berfungsi agar teori yang diciptakannya mudah dimengerti oleh setiap manusia. Rangkaian alat tujuan yang dibentuk oleh Parsons, yaitu tindakan sosial akan ditujukan untuk sebuah tujuan atau sudah memiliki suatu tujuan, tindakan sosial dapat berlangsung karena terdapat beberapa elemen sudah pasti ada dan elemen-elemen lainnya digunakan sebagai alat untuk mengapai tujuan yang akan dicapai, dan tindakan sosial tersebut dilaksanakan sesuai pemilihan alat dan tujuan. Berdasarkan rangkaian alat tujuan yang dikemukakan oleh Parson, maka seluruh tindakan sosial yang dijalani individu atau kelompok dapat dipandang sebagai wujud dari kenyataan sosial yang terkecil dan paling fundamental. Dalam rangkaian Parsons, yang dimaksud dengan elemen-elemen dasar tindakan sosial, seperti tujuan, kondisi, norma, dan alat. Teori struktur fungsional Talcott Parsons bukan hanya berdasarkan tindakan sosial, tetapi terdapat empat syarat supaya fungsional dalam sebuah sistem sosial dapat terlaksanakan dengan baik (Juwita et al., 2020), sebagai berikut:

- 1) *Adaptation* (adaptasi) merupakan suatu sistem harus menanggulangi kondisi eksternal yang genting. Sistem harus menyesuaikan diri mengikuti lingkungan dan menyesuaikan lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
- 2) *Goal Attainment* (pencapaian tujuan) merupakan suatu sistem harus mengartikan dan mengapai tujuan utama.
- 3) *Integration* (integrasi) merupakan suatu sistem harus mengatur antar hubungan bagian-bagian yang menjadi elemennya. Sistem juga harus mengatur antar hubungan dari ketiga fungsi penting lainnya, yaitu *adaptation, goal attainment, dan latency*.

- 4) *Latency* (latensi atau pemeliharaan pola) merupakan suatu sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual atau pola-pola kultural yang menghasilkan dan menopang motivasi..

Teori Struktural Fungsional apabila dikaitkan dengan pengelolaan dana desa dalam menanggulangi kemiskinan tidak lepas dari struktur desa, yaitu pemerintah desa sebagai eksekutor dan masyarakat sebagai penerima. Akan tetapi, keduanya termasuk sebagai elemen yang menyatu dalam masyarakat. Keduanya pun memiliki fungsi masing-masing yang saling mempengaruhi dan saling merawat karena memiliki satu tujuan.

2.6 Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti lain terkait topik yang memiliki tema serupa. Berikut adalah penelitian terdahulu yang menjadi tolak ukur dan refrensi dalam penelitian ini:

1. Jurnal oleh Ivan Zulfikar Wibowo dan Puji Lestari tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Program Dana Desa Melalui Kegiatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten)*” memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui implementasi program dana desa di Tambong Wetan dan dampak sosial ekonomi adanya program ini, khususnya dalam bentuk pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi serta teori yang digunakan adalah teori perubahan sosial. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Lestari adalah dana desa yang diperoleh Desa Tambong Wetan diimplementasikan dalam bentuk pembangunan fisik dan non-fisik (pemberdayaan masyarakat) dan berdampak pada sosial ekonomi, yaitu meningkatnya kesejahteraan warga desa, potensi sumber daya lokal desa terkelola dengan baik, terjangkau dalam pelayanan dasar, tumbuh rasa kebersamaan, keswadaya, dan lainnya (Wibowo dan Lestari, 2021).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo dan Lestari memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada teori yang digunakan. Peneliti melakukan penelitian dengan teori struktural fungsional oleh Talcott Parson, sedangkan Wibowo dan Lestari menggunakan teori perubahan sosial. Penelitian ini akan memberikan pembaharuan untuk melihat pengelolaan dana desa dalam menanggulangi kemiskinan, dimana tidak lepas dari struktur desa, yaitu pemerintah desa sebagai eksekutor dan masyarakat sebagai penerima. Akan tetapi, keduanya termasuk sebagai elemen yang menyatu dalam masyarakat. Keduanya pun memiliki fungsi masing-masing yang saling mempengaruhi dan saling merawat karena memiliki satu tujuan.

2. Jurnal oleh Mufti Arfiansyah tahun 2020 yang berjudul “*Dampak Dana Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah*” memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui pengaruh dari dana desa dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah adalah dana desa memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, semakin meningkat dana desa akan membuat kemiskinan menurun. Dana desa digunakan secara baik dan tepat untuk bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif kepada kemiskinan, semakin meningkat pertumbuhan ekonomi akan membuat kemiskinan menurun (Arfiansyah, 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada metode penelitian. Peneliti melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arfiansyah menggunakan metode kuantitatif deskriptif.

3. Jurnal oleh Reynaldi Idil Jibran tahun 2023 yang berjudul “*Upaya Pemerintah Desa untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Batuah*”, memiliki tujuan untuk mengetahui upaya pemerintah Desa Batuah dalam menanggulangi kemiskinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif normatif serta penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Jibran adalah upaya pemerintah Desa Batuah untuk menanggulangi kemiskinan hanya berfokus memberikan bantuan tunai, baik dari pusat atau pun dari dana desa yang bersumber dari APBDes. Bantuan yang bersumber dari Desa yakni Bantuan Tunai Langsung (BLT), sementara bantuan yang bersumber dari pusat atau Kementerian Sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan, warga Desa Batuah berbagai bantuan tunai tersebut sangat membantu kehidupan mereka sehari-hari (Jibran, 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jibran memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada fokus upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan. Peneliti melakukan penelitian yang berfokus pada upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan dana desa, sedangkan penelitian oleh Jibran berfokus pada upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara memberikan bantuan tunai.

4. Jurnal oleh Satra Ika Dinata, Muhamir Al-Fairusy, dan Jovial Pally Taran tahun 2023 yang berjudul “*Strategi Kepala Desa Menanggulangi Kemiskinan di Desa Along Kabupaten Simeulue*” memiliki tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui tentang strategi pemberdayaan masyarakat melalui dana desa sebagai upaya menetas kemiskinan di Desa Along Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan (*Field Research*). Peneliti menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Dinata dan kawan-kawan adalah strategi yang

dilakukan oleh Pemerintah Desa Along melalui pemberdayaan masyarakat dengan adanya dana desa mampu menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Desa Along dengan cara pelayanan pendidikan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), BUMdes, dan renovasi rumah tidak layak huni. Dibuktikan dengan perubahan status Desa Along dari sebelum adanya dana desa adalah desa tertinggal, kemudian setelah adanya dana desa menjadi desa berkembang dan optimis untuk menjadi desa mandiri (Dinata et al., 2023).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dinata dan kawan-kawan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu pada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Desa Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sedangkan lokasi penelitian yang dilakukan oleh Dinata dan kawan-kawan berada di Desa Along, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue. Selain itu, terdapat juga perbedaan dalam penanggulangan kemiskinan. Peneliti berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui BUMDes dan PKK yang diberikan pelatihan untuk meningkatkan ekonomi. Sementara oleh penelitian Dinata et al., berfokus pada bantuan sosial, bumdes dan renovasi rumah layak huni.

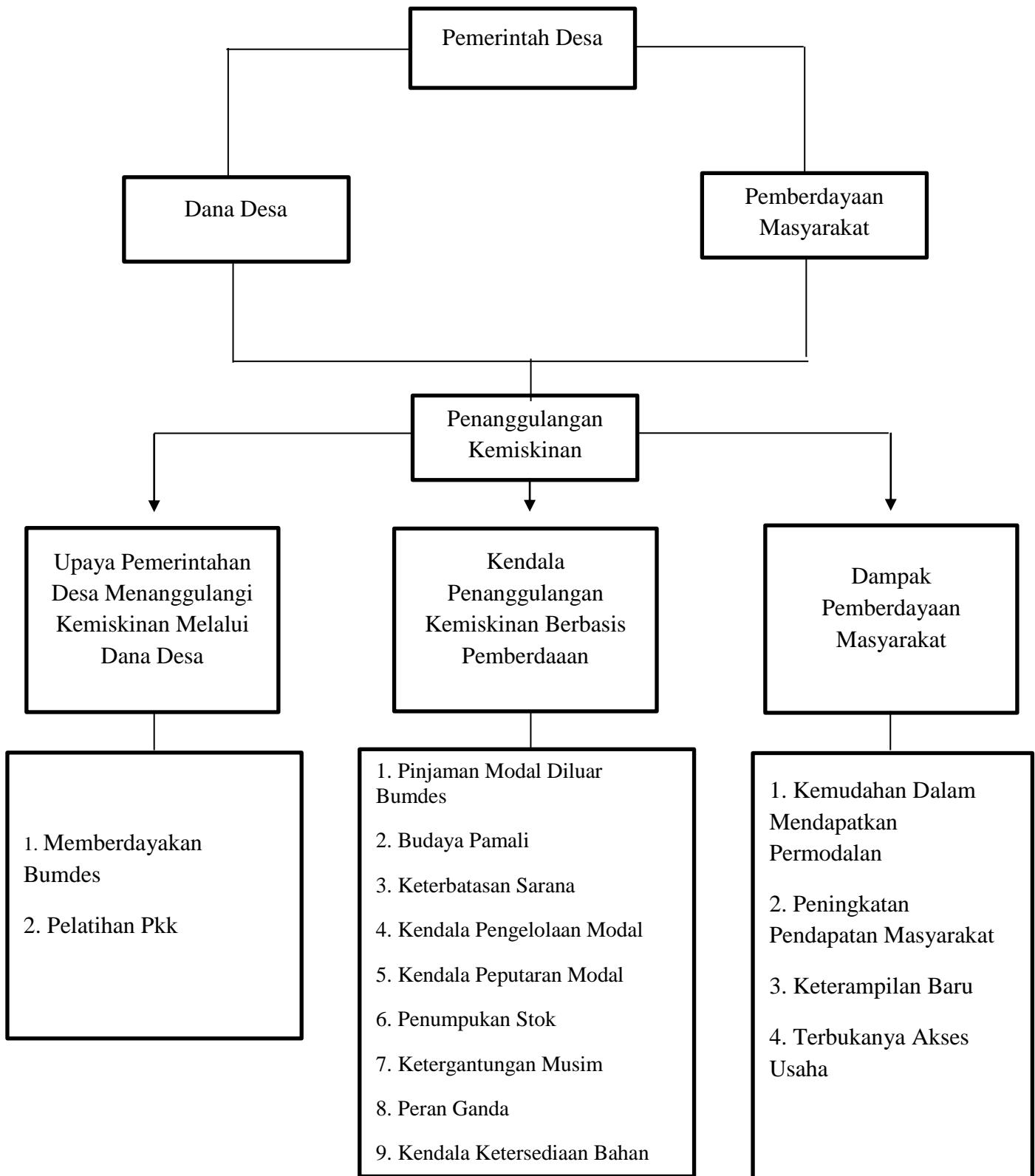
2.7 Kerangka Berpikir

Penelitian ini dilakukan guna melihat upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya sebagai pengurus dan pengelola kebutuhan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan. Penyebab kemiskinan di Desa Sukanegeri Jaya diakibatkan oleh kurangnya lahan pertanian dan ketergantungan bantuan sosial, yaitu BLT DD. Melihat penyebab kemiskinan yang terjadi di desa pemerintah desa pun memanfaatkan program pemberdayaan masyarakat yang sudah terbentuk di desa, supaya masyarakat desa lebih mandiri, kreatif, dan tidak bergantung. Selain itu, pemerintah desa juga memanfaatkan dana desa sebagai salah satu fasilitas untuk membantu berjalannya program-program pemberdayaan masyarakat dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada di desa. Maka,

ditemukannya upaya yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan.

Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya berbasis pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi oleh dana desa terdapat dua cara. Upaya yang pertama, yaitu pemerintah desa memanfaatkan BUMDes Se'at Jaya yang sudah terbentuk dan disuntikkan modal semenjak tahun 2016. Sedangkan, upaya kedua adalah pemerintah desa bergandengan tangan dengan PKK dalam mengadakan pelatihan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan ibu-ibu desa. Akan tetapi, selama pelaksanaannya masih mengalami banyak kendala, yaitu keterikatan keuangan pengrajin kepada pihak di luar BUMDes, pola pikir "pamali" dan hambatan budaya, keterbatasan sarana produksi yang tidak sesuai kebutuhan, kendala bekerja sama dengan usaha retail, perputaran modal terhambat akibat sistem titip jual, penumpukan stok akibat pembelian bahan baku dalam jumlah besar, ketergantungan pada musim dan acara adat dalam permintaan pasar, peran ganda anggota PKK, kendala ketersediaan bahan baku dalam usaha keripik orak-arik talas.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa berdampak positif bagi anggota yang bergabung dengan program pemberdayaan tersebut. Dampak positif yang dirasakan, yaitu masyarakat yang memiliki usaha atau ingin membuka usaha mendapatkan kemudahan dalam permodalan dikarenakan BUMDes Se'at Jaya bergerak dalam bidang pemberian modal dan terbuka untuk siapa saja selama mampu mengikuti persyaratan yang diberikan oleh BUMDes. Dampak lainnya yang dirasakan oleh anggota adalah, peningkatan pendapatan masyarakat, keterampilan baru, dan terbukanya akses terhadap peluang usaha. Selain itu, ibu-ibu menjadi lebih percaya diri membuka usaha rumahan guna membantu memperbaiki taraf hidup mereka.



Gambar 4. Kerangka Berpikir

Sumber: Olah Data Primer, 2025

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna dari berbagai fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang valid dan sesuai dengan fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti perlu turun langsung ke lapangan dengan mengandalkan pancaindra peneliti. Penelitian ini akan melibatkan beberapa informan yang diwawancara oleh peneliti. Penelitian kualitatif termasuk sebagai sebuah strategi penyelidikan yang berfokus pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol atau pun deskripsi terkait sebuah fenomena yang dapat dijadikan ilmu berharga untuk pengembangan konsep teori. Penelitian ini memiliki fokus multimetode, alami, holistik, dan kualitas dengan penyajiannya secara naratif. Secara garis besar penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk memahami secara holistik fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan lainnya dengan cara deskriptif dalam suatu kondisi khusus yang alami tanpa campur tangan manusia serta memanfaatkan secara optimal sebagai metode ilmiah yang lazim digunakan (Sidiq dan Choiri, 2019).

Penelitian kualitatif dipilih karena sifatnya yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu ingin menyajikan data secara mendalam melalui wawancara dan observasi sesuai dengan situasi di lapangan terkait upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa dengan diamati melalui teori struktural fungsional serta ingin mengetahui kendala dalam penanggulangan kemiskinan, dan dampak yang dirasakan masyarakat dari adanya pemberdayaan masyarakat.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Sukanegeri Jaya, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Dipilihnya Desa Sukanegeri Jaya karena merupakan salah satu desa yang mengalami kemiskinan yang disebabkan oleh beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah selama terjadinya pandemi COVID-19. Selain itu, Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya menfaatkan dana desa untuk membentuk pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelatihan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat guna menanggulangi kemiskinan. Sehingga sesuai dengan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, kendala yang dialami dalam menganggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pemberdayaan masyarakat.

3.3 Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif menyatakan bahwa sebuah gejala atau fenomena yang diamati bersifat holistik, yang berarti tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Fokus penelitian kualitatif diartikan sebagai pokok permasalahan yang masih bersifat umum dan menjadi batasan masalah dalam penelitian. Dengan begitu peneliti menetapkan batasan penelitian, sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa yang diperoleh di Desa Sukanegeri Jaya. Upaya pemerintah desa yang dimaksud, yaitu memberikan suntikan modal kepada BUMDes dan mendanai pelatihan untuk PKK
2. Melihat kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya. Kendala-kendala tersebut dapat dari internal ataupun eksternal, seperti pinjaman modal diluar BUMDes, budaya pamali, keterbatasan sarana, kendala pengelolaan modal, kendala peputaran modal, penumpukan stok, ketergantungan musim, peran ganda, kendala ketersediaan bahan baku.
3. Melihat dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dibentuk pemerintah desa

melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya. Dampak yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu kemudahan dalam mendapatkan permodalan, peningkatan pendapatan masyarakat, ketterampilan baru, terbukanya akses usaha

3.4 Penentuan Informan

Penentuan informan sangat penting dilakukan untuk memperoleh data yang valid dan mendalam. Penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive*. Teknik ini adalah teknik memilih informan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan memperhatikan berbagai kriteria. Kriteria yang dimaksud, yaitu memiliki pengetahuan tentang objek yang akan diteliti, informan berada dalam komunitas yang akan diteliti, dan lainnya (Kaharuddin, 2021). Dalam penelitian ini informan yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Bapak Risdianto selaku Kepala Desa Sukanegeri Jaya yang menjabat tahun 2024 yang berkuasa penuh dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.
2. Bapak Andriyansyah Puad selaku Sekretaris Desa Sukanegeri Jaya yang menjabat tahun 2024 yang mengoordinasikan pelaksanaan pengelola keuangan desa.
3. Ibu Widarti selaku Kaur Keuangan Desa Sukanegeri Jaya yang menjabat tahun 2024 yang mengelola administrasi keuangan desa.
4. Bapak Faizir Rahman selaku Ketua BUMDes Se'at Jaya yang berkuasa terhadap perencanaan dan pelaksanaan program BUMDes.
5. Bapak Desvenriyadi selaku Bendahara BUMDes Se'at Jaya yang memiliki akses dan pemahaman terkait dana yang dikelola oleh BUMDes.
6. Ibu Sustra Amelia selaku Ketua PKK yang merancang dan melaksanakan kegiatan pelatihan.
7. Ibu Romis selaku Wakil Ketua PKK yang ikut serta mendampingi dan mengoordinasikan pelatihan.
8. Bapak Tatang selaku Ketua Unit Jaga Karya yang menjalin kerja sama dengan BUMDes Se'at Jaya.
9. Bapak Asmat selaku Anggota Unit Jaga Karya yang menjalin kerja sama dengan BUMDes Se'at Jaya.

10. Zaidhie selaku Ketua Badan Hippun Pemekonan (BHP) sekaligus pemilik Sanggar Putri Ayu yang menjalin kerja sama dengan BUMDes Se'at Jaya.
11. Hirodiah selaku pemilik Sanggar Putri Ayu yang menjalin kerja sama dengan BUMDes Se'at Jaya
12. Nailiyati selaku Anggota PKK yang pernah mengikuti pelatihan dari PKK dan membuka usaha keripik rumahan.
13. Susi Anggota PKK yang pernah mengikuti pelatihan dari PKK dan membuka usaha keripik rumahan

Tabel 3. Penentuan Informan

No.	Tujuan Penelitian	Informan
1.	Untuk mengetahui upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.	Semua Informan
2.	Mengetahui kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.	Bapak Risdianto, Bapak Andriyansyah Puad, Ibu Widarti, Bapak Faizir, Bapak Desvenriyadi Ibu Sustra, Ibu Romis.
3.	Mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dibentuk pemerintah desa melalui dana desa.	Bapak Tatang, Bapak Asmat, Bapak Zaidhie, Ibu Hirodiah, Ibu Nailiyati, Ibu Susi.

Sumber: Olah Data Primer, 2025

3.5 Sumber Data

Adapun sumber yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui pencarian langsung oleh peneliti. Data primer mempunyai kelebihan dalam keakuratan karena peneliti dapat mengatur dalam proses pengumpulan data dan dapat menjamin bahwa data yang didapatkan relevan dengan masalah penelitian yang diteliti (Kaharuddin, 2021). Penelitian ini menggunakan data primer sebagai landasan utama dengan cara wawancara secara langsung oleh informan yang mempunyai pemahaman yang ahli terkait upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana

desa di Desa Sukanegeri Jaya, kendala yang terjadi selama menanggulangi kemiskinan, serta dampak yang dirasakan oleh anggota yang bergabung program pemberdayaan masyarakat.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui pihak lain yang telah mendokumentasikan yang dapat digunakan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Data sekunder didapatkan dari bermacam jenis sumber, seperti jurnal ilmiah, buku, dokumen pemerintah basis data *online* atau *offline*, atau pun hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber sifat pendukung (Kaharuddin, 2021). Data pendukung yang dimaksud berupa laporan yang berkaitan dengan data gambaran umum dan pembangunan Desa Sukanegeri Jaya, yaitu dokumen tentang profil desa.

Tabel 4. Sumber Data

No.	Tema Informasi	Sumber Data
1.	Gambaran umum Desa Sukanegeri Jaya	Sekunder
2.	Pembangunan Desa Sukanegeri Jaya	Sekunder
3.	Potret kemiskinan dan bantuan sosial di Desa Sukanegeri Jaya	Primer
4.	Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.	Primer
5.	Kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.	Primer
6.	Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dibentuk pemerintah desa melalui dana desa.	Primer

Sumber : Olah Data Primer, 2025

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang mencakup :

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mendatangi informan yang ada di Desa Sukanegeri Jaya. Observasi ini dilakukan dengan cara terstruktur, yaitu peneliti sudah memiliki tujuan untuk mengamati apa saja yang ada di lapangan seperti, peneliti mengamati upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Sukanegeri Jaya. Selain itu, peneliti juga mengamati kegiatan pemberdayaan yang dibentuk

melalui dana desa dengan tujuan untuk mendapatkan data lapangan mengenai dampak yang dirasakan oleh anggota pemberdayaan masyarakat.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara semi tersuktur, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pedoman wawancara yang sudah dibuat sebelumnya, lalu peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian terkait penyebab kemiskinan, upaya, kendala dan dampak pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya namun peneliti tidak behenti sampai situ saja untuk memperoleh informasi, oleh karena itu peneliti juga bertanya lebih banyak terkait apa yang diinginkan oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Penelitian ini mengguakan metode dokumen yang dikumpulkan berupa hasil wawancara, foto-foto, dan hasil observasi di lapangan terkait upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dokumen profil desa untuk mengumpulkan data gambaran umum dan pembangunan desa. Dengan demikian, selama menjalankan pengumpulan data peneliti menggunakan alat bantu berupa buku catatan, kamera, perekam suara serta pedoman wawancara.

Tabel 5. Teknik Pengumpulan Data

No.	Tema Informasi	Teknik Pengumpulan Data
1.	Gambaran umum Desa Sukanegeri Jaya	Dokumentasi
2.	Pembangunan Desa Sukanegeri Jaya	Dokumentasi
3.	Potret kemiskinan dan bantuan sosial di Desa Sukanegeri Jaya	Wawancara dan observasi
4.	Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.	Wawancara dan dokumentasi
5.	Kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.	Wawancara dan dokumentasi
6.	Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dibentuk pemerintah desa melalui dana desa.	Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Sumber : Olah Data Primer, 2025

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data model Miles dan Huberman, yakni:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan akan berjumlah banyak, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data adalah mengikhtisarkan, memilih atau menentukan hal-hal pokok yang terdapat dicatatan lapangan, berfokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang yang tidak perlu. Dengan begitu, data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam atau jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila dibutuhkan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik dengan memberikan aspek-aspek tertentu (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam penelitian ini akan mereduksi data dengan memilih catatan lapangan yang diperoleh dari observasi, seperti catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi yang berupa laporan, foto, video, atau audio yang berkaitan dengan upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa di Desa Sukanegeri Jaya, kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dibentuk pemerintah desa melalui dana desa.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan untuk menyusun sekumpulan informasi. Sehingga akan memunculkan kemungkinan perlunya analisis dan pengambil tindakan. Penyajian data dapat berbentuk, seperti teks naratif dari tabel dan grafik. Bentuk-bentuk penyajian data tersebut akan menyatukan informasi yang tersusun terkait upaya pemerintah desa dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan dalam sebuah

bentuk yang padu dan mudah diraih, sekaligus memudahkan untuk melihat hal yang sedang terjadi, serta dapat menentukan terkait kesimpulan sudah tepat atau perlu melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Upaya penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti secara berkesinambungan selama di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif sudah mencari makna terkait benda-benda, mencatat penyusunan pola-pola (dalam catatan teori), uraian penjelasan, berbagai konfigurasi yang memungkinkan, proposisi, serta alur sebab-akibat. Dalam membentuk kesimpulan dilakukan secara luas, terbuka, dan tidak bimbang. Meski begitu, peneliti telah mempunyai penarikan kesimpulan, walau pun perlu lebih dirinci agar berakar kuat. Dalam membuat kesimpulan tersebut wajib diverifikasi saat penelitian berlangsung, seperti meninjau ulang selama penulisan, memeriksa ulang catatan lapangan, memeriksa kembali dan membahasnya bersama teman untuk mengembangkan kesepakatan, lebih berupaya dalam menentukan temuan dalam salinan untuk melengkapi data yang ada.

Penelitian ini akan membentuk kesimpulan melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah melewati tahapan reduksi data dan penyajian data. Kesimpulan dalam penelitian ini akan disusun berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh informan terkait rumusan masalah yang diteliti. Pembuatan kesimpulan ini memandang berdasarkan seluruh upaya pemerintah desa dan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa, kendala yang dihadapi, serta dampaknya.

Tabel 6. Teknik Analisis Data

No.	Tema Informasi	Informan	Data	Pengumpulan Data	Analisis
1.	Gambaran umum Desa Sukanegeri Jaya	Pemerintah desa	Sekunder	Dokumentasi	Deskriptif, grafik, dan tabel
2.	Pembangunan Desa Sukanegeri Jaya	Pemerintah desa	Sekunder	Dokumentasi	Deskriptif, grafik, dan tabel
3.	Potret kemiskinan dan bantuan sosial di Desa Sukanegeri Jaya	Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD).	Primer	Wawancara dan Observasi	Deskriptif dan tabel
4	Upaya pemerintah desa dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.	Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua Bumdes, dan Ketua PKK.	Primer	Wawancara terstruktur dan dokumentasi	Deskriptif dan tabel
5	Kendala dalam menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.	Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua Bumdes, dan Ketua PKK.	Primer	Wawancara terstruktur dan dokumentasi	Deskriptif dan tabel
6.	Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dari program pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan yang dibentuk pemerintah desa melalui dana desa.	Anggota dari Bumdes, Anggota PKK, Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ketua Bumdes, dan Ketua PKK	Primer	Observasi, wawancara terstruktur dan dokumentasi	Deskriptif dan tabel

Sumber : Olah Data Primer, 2025

IV. GAMBARAN UMUM

Pada bab 4 berisi tentang gambaran umum Desa Sukanegeri Jaya yang meliputi kondisi geografis, demografis, suku, pendidikan, perekonomian, serta pembangunan di Desa Sukanegeri Jaya.

4.1 Gambaran Umum Desa Sukanegeri Jaya

4.1.1 Sejarah Desa Sukanegeri Jaya

Desa Sukanegeri Jaya merupakan desa yang berdiri tahun 1925 Masehi di Talang Padang, Kabupaten Tanggamus. Desa Sukanegeri Jaya berasal dari Desa Banjar Negeri, Cukuh Balak. Pada awalnya Desa Sukanegeri Jaya bernama Sukanegeri yang bersatu dengan Sukabumi. Kemudian, terjadi pemekaran pada tahun 1971 melalui SK Gubernur atau KDH tanggal 7 Januari 1971 Nomor 06/07/di/hk/1971.

Kepala desa yang pernah menjabat di Desa Sukanegeri Jaya, yaitu:

1. Sabirin Rajasyah (1971-2006) sebagai Pejabat Definitif.
2. Ahmad Siaruddin (2006-2019) sebagai Pejabat Definitif.
3. Yunidawati, S.Pd. (2019-2021) sebagai Pelaksana Jabatan.
4. Risdianto (2021-sekarang) sebagai Pejabat Definitif.

4.1.2 Geografis Desa Sukanegeri Jaya

a. Dusun di Desa Sukanegeri Jaya

Desa Sukanegeri Jaya terdapat 2 dusun dan 5 RT (Rukun Tetangga), yaitu:

1. Dusun 1 yang mencakup RT 1, 2, dan 5.
2. Dusun 2 yang mencakup RT 3 dan 4.

b. Luas Wilayah

1. Luas pemukiman warga sebesar 30 hektar.
2. Luas lahan persawahan sebesar 20 hektar.

3. Luas lahan lainnya sebesar 10 hektar.

c. Batas Wilayah

1. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sukabumi.
2. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Banjarsari.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukabumi.
4. Sebelah utara berbatasan dengan Banding Agung.

4.1.3 Demografis Desa Sukanegeri Jaya

a. Kependudukan Desa Sukanegeri Jaya

Jumlah kependudukan di Desa Sukanegeri Jaya mengalami perubahan setiap tahunnya. Berdasarkan hasil data administrasi Desa Sukanegeri Jaya tahun 2024, didapatkan bahwa jumlah penduduk Desa Sukanegeri Jaya sebesar 1.043 jiwa yang. Untuk jenis kelamin terbagi dengan seimbang, yaitu laki-laki sebesar 528 jiwa dan perempuan sebesar 515 jiwa. Sedangkan, jumlah kepala keluarga di Desa Sukanegeri Jaya terdapat sebanyak 297 KK (Kepala Keluarga).

b. Agama Masyarakat Desa Sukanegeri Jaya

Berdasarkan hasil data administrasi Desa Sukanegeri Jaya tahun 2024 menyatakan bahwa sebanyak 1.043 jiwa menganut agama Islam sehingga dapat dikatakan agama seluruh penduduk desa 100% islam. Contoh, kegiatan keagamaan yang di Desa Sukanegeri Jaya, yaitu acara maulid nabi yang selalu diadakan setiap tahunnya. Kegiatan ini selalu diikuti oleh hampir seluruh masyarakat desa. Selanjutnya, acara syukuran atau peresmian musala Hasanuddin Al Haq Desa Sukanegeri Jaya.

c. Suku dan Budaya Desa Sukanegeri Jaya

Data administrasi Desa Sukanegeri Jaya menunjukkan bahwa terdapat 9 suku yang ada di Desa Sukanegeri Jaya beraneka ragam. Sehingga dapat dikatakan Desa Sukanegeri Jaya memiliki suku yang sangat beraneka ragam. Berikut merupakan tabel data aneka ragam suku tersebut dan jumlah jiwanya:

Tabel 7. Keragaman Suku di Desa Sukanegeri Jaya

No.	Suku	Jumlah Jiwa
1.	Lampung	759
2.	Sunda	201
3.	Jawa	38
4.	Semendo	23
5.	Banten	8
6.	Batak	4
7.	Palembang	4
8.	Betawi	3
9.	Melayu	3
	Total	1043

Sumber: Profil Desa Sukanegeri Jaya, 2024.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa meski terdapat banyak suku di Desa Sukanegeri Jaya, suku Lampung tetap mendominasi dengan jumlah sebanyak 759 jiwa. Sementara, suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Betawi dan suku Melayu, dimana jumlahnya masing-masing 3 jiwa. Kuatnya suku Lampung menjadikan kebudayaan Lampung masih kental di lingkungan kehidupan masyarakat Desa Sukanegeri Jaya. Meski begitu, masyarakat yang memiliki suku lainnya tetap berhubungan baik dengan masyarakat suku Lampung, mereka tetap bersatu untuk mengembangkan Desa Sukanegeri Jaya, seperti dalam kegiatan kemasyarakatan, kebudayaan, dan lainnya.

Berdasarkan wawancara bersama sekretaris desa bahwa kegiatan gotong royong dilaksanakan minimal sekali dalam sebulan. Selama pelaksanaan gotong royong masyarakat tergolong aktif mengikuti kegiatan. Sementara, warga yang tidak bisa mengikuti kegiatan gotong royong biasanya mengirimkan makanan ataupun minuman secara inisiatif untuk masyarakat yang melaksanakan gotong royong. Hal tersebut sebagai permintaan maaf karena tidak bisa mengikuti kegiatan gotong royong.

Selanjutnya, terdapat kegiatan PKK yang diisi oleh ibu-ibu yang bekerja ataupun tidak bekerja. Selama kegiatan PKK ibu-ibu yang mengikutinya tergolong aktif sesuai dengan program kerja yang mereka dapatkan. PKK

tersebut memiliki banyak kegiatan, salah satunya adalah melakukan kreasi membuat makanan, seperti kue. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menambah keterampilan ibu-ibu dalam mengolah makanan yang selaras dengan kegunaannya untuk pertumbuhan dan kesehatan, baik jasmani atau rohani. Selain itu, dengan keterampilan yang didapatkan tersebut dapat membantu para ibu yang ingin menambah penghasilan.

Ngarak maju merupakan budaya yang terkenal di Desa Sukanegeri Jaya. Budaya ngarak maju adalah perayaan pernikahan yang melibatkan pengantin, keluarga, dan warga, khususnya pemuda-pemudi untuk melaksanakan prosesi mengelilingi desa. Pelaksanaan ngarak maju ini akan diiringi dengan kesenian pincak khakot dan butabuh. Pincak khakot merupakan kesenian bela diri menggunakan pusaka atau pedang. Dalam adat Saibatin, pincak khakot memiliki makna sebagai pengawal untuk menjaga para tamu agung, pengantin, dan lainnya dari bahaya yang tidak diinginkan. Sehingga dalam ngarak maju pincak khakot ditempatkan pada barisan terdepan. Selanjutnya, butabuh merupakan kesenian musik tradisional yang dimainkan menggunakan alat bernama rebana yang disertai dengan selawat dan syair-syair berupa zikir lama dan zikir baru.

d. Fasilitas Sarana Pendidikan Desa Sukanegeri Jaya

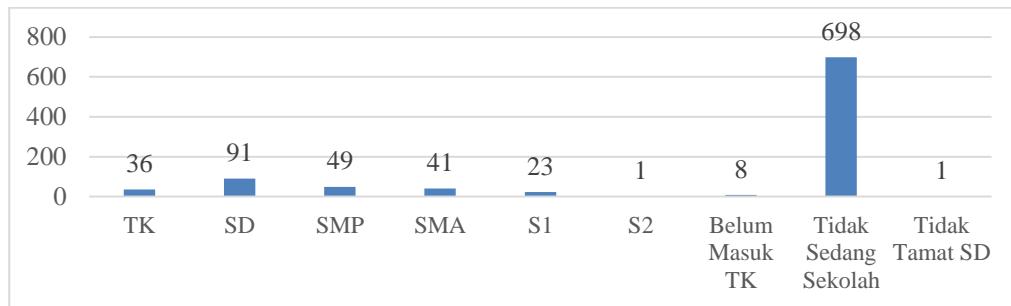
Pendidikan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan setiap masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan pendidikan partisipasi angkatan kerja dan produktivitas akan meningkat. Keunggulan kompetitif lebih sebagai penentu kesuksesan bangsa dalam era globalisasi saat ini, seperti kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia tersebut dapat dilihat melalui pendidikan penduduk. Berdasarkan data Desa Sukanegeri Jaya menunjukkan bahwa terdapat sarana pendidikan yang berada dekat dengan Desa Sukanegeri Jaya sebagai berikut:

Tabel 8. Sarana Pendidikan Desa Sukanegeri Jaya

No.	Nama Sarana Pendidikan	Letak
1.	Paud Harapan Kami	Desa Sukanegeri Jaya
2.	SDN 2 Banding Agung	Banding Agung
3.	MTSN 2 Tanggamus	Desa Suka Banjar
4.	SMAN 1 Talang Padang	Desa Banjar Sari
5.	SMK 1 Talang Padang	Banding Agung
6.	Perpustakaan Andan Ya	Desa Sukanegeri Jaya

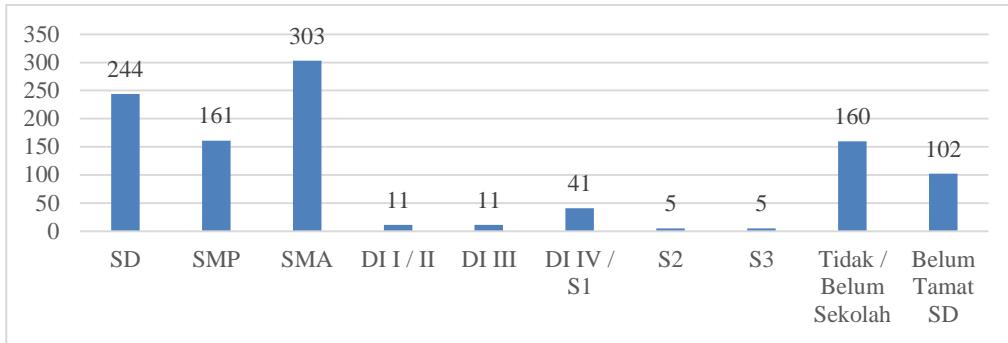
Sumber: Profil Desa Sukanegeri Jaya, 2024.

Berdasarkan data sarana pendidikan menunjukkan bahwa sarana pendidikan cukup memadai dengan letak yang dekat dengan desa. Selain itu, pemerintah Desa Sukanegeri Jaya memberikan anggaran untuk bidang pendidikan, baik dari anggaran desa atau sumber lainnya, seperti membangun Perpustakaan Andan Ya dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam menambah wawasan. Selanjutnya, data grafik mengenai pendidikan yang sedang ditempuh oleh penduduk desa saat ini sebagai berikut:

**Gambar 5. Jenjang Pendidikan yang sedang ditempuh Penduduk Desa Tahun 2024**

Sumber: Profil Desa Sukanegeri Jaya, 2024.

Terakhir, data grafik mengenai jumlah lulusan pendidikan masyarakat Desa Sukanegeri Jaya sebagai berikut:



Gambar 6. Profil Lulusan Pendudukan Desa Sukanegeri Jaya 2024

Sumber: Profil Desa Sukanegeri Jaya, 2024.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat desa banyak yang sudah menamatkan pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), yaitu sebanyak 303 warga. Berdasarkan observasi dan wawancara bersama pemerintah desa dan beberapa masyarakat, Desa Sukanegeri Jaya termasuk kategori desa yang penduduknya sudah sadar akan pentingnya pendidikan. Setelah menamatkan SMA, para generasi muda banyak yang memilih untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu Sarjana (S1) dan terdapat juga beberapa yang melanjutkan program pendidikan Magister (S2). Akan tetapi, tetap terdapat banyak juga penduduk desa yang sudah menamatkan SMA belum atau tidak ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang disebabkan oleh tidak adanya biaya dan lebih memilih untuk langsung bekerja.

e. Kondisi Perekonomian Desa Sukanegeri Jaya

Desa Sukanegeri Jaya telah mengembangkan reputasi yang kuat melalui industri pengrajin besi dan bordir khas Lampung yang telah berkembang selama bertahun-tahun dengan keahlian yang diurunkan secara turun-temurun. Produk yang dihasilkan berupa golok, pisau, dan alat pertanian yang terkenal dengan kualitasnya yang tinggi dan desain yang khas.

Pada bidang bordir beberapa warga memiliki keterampilan dalam membuat motif-motif bordir yang khas dan rumit. Hasil bordiran memiliki kualitas yang

bagus dan sering digunakan untuk menghias pakaian tradisional, perlengkapan rumah tangga, dan lainnya. Sama halnya dengan pengrajin besi, pengrajin bordir di Desa Sukanegeri Jaya tidak hanya menghasilkan produk untuk masyarakat desa saja, tetapi para pengrajin bordir juga menghasilkan produk untuk ke kota dan luar kota. Kedua industri tersebut tidak hanya memberikan penghasilan kepada para pengrajin, tetapi memberikan dampak positif lain, yaitu menciptakan lapangan kerja lokal. Selain itu, masih terdapat sektor pekerjaan lain yang digeluti oleh penduduk sebagai berikut:

Tabel 9. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Sukanegeri Jaya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Belum/Tidak Bekerja	141
2.	Mengurus Rumah Tangga	248
3.	Pelajar/Mahasiswa	257
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	20
5.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1
6.	Kepolisian Ri (Polri)	2
7.	Perdagangan	2
8.	Petani/Pekebun	34
9.	Industri	2
10.	Karyawan Swasta	46
11.	Karyawan Honorer	6
12.	Buruh Harian Lepas	41
13.	Buruh Tani/Perkebunan	36
14.	Pembantu Rumah Tangga	13
15.	Seniman	2
16.	Dosen	1
17.	Guru	16
18.	Bidan	1
19.	Perawat	1
20.	Sopir	5
21.	Pedagang	13
22.	Perangkat Desa	6
23.	Kepala Desa	1
24.	Wiraswasta	148

Sumber: Profil Desa Sukanegeri Jaya, 2024.

Berdasarkan data tersebut menunjukkan mata pencaharian lebih banyak diisi oleh pelajar/mahasiswa dan ibu rumah tangga. Pada banyak desa, struktur ekonomi sering mencerminkan pola tradisional, yaitu peran perempuan cukup sebagai ibu rumah tangga yang tertanggung jawab mengurus rumah, anak-anak, memasak, dan lainnya. Akan tetapi, berdasarkan observasi dan

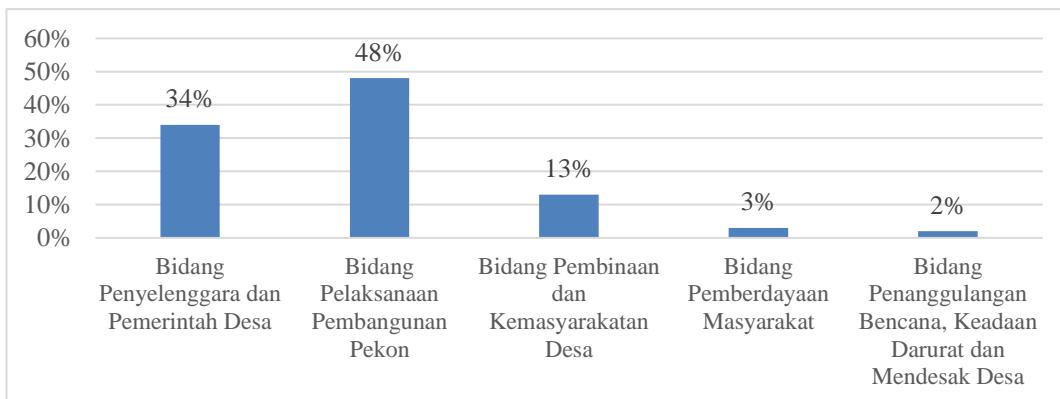
wawancara bersama beberapa ibu rumah tangga di Desa Sukanegeri Jaya, kebanyakan dari mereka tidak hanya berdiam saja dirumah. Dalam menghadapi tekanan ekonomi yang lalu melambung tinggi, mereka memilih tetap bekerja menjadi buruh tani sebagai pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Para ibu rumah tangga akan mulai bekerja menjadi buruh tani ketika musim tanam padi hingga panen. Mereka akan pergi bekerja untuk menanam atau memanen pada subuh dan selesai pukul 07.00 atau 08.00 wib. Walaupun, pekerjaan tersebut akan menambah beban kerja, para ibu rumah tangga memilih untuk melawan tantangan tersebut supaya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. Untuk pekerjaan buruh tani itu sendiri tidak hanya diisi oleh para ibu rumah tangga saja, siapapun yang ingin menambah pendapatan dan memiliki waktu luang dapat ikut bekerja.

Pekerjaan lain yang dominan adalah wiraswasta, seperti sebagai tenaga penjualan, kredit barang, dan perdagangan. Sebagai tenaga penjualan mereka akan menawarkan dan menjual produk atau layanan kepada konsumen, biasanya mereka memiliki keterampilan komunikasi dan pengetahuan tentang produk atau layanan yang mereka tawarkan. Untuk kredit barang mereka akan memberikan fasilitas kredit kepada konsumen pada pembelian barang dengan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Dan, dalam perdagangan mereka akan menjual barang secara ecer atau grosir.

4.2 Pembangunan Desa Sukanegeri Jaya

Pembangunan Desa Sukanegeri Jaya merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat lokal. Sebagai wilayah administratif yang berada di Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, Desa Sukanegeri Jaya menunjukkan kemajuan bertahap dalam berbagai aspek pembangunan, baik fisik maupun nonfisik. Pemerintah desa bersama seluruh elemen masyarakat berupaya mewujudkan desa yang mandiri, berdaya saing, serta berlandaskan pada prinsip gotong royong dan kearifan lokal. Pembangunan fisik diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi warga, seperti perbaikan jalan lingkungan, pembangunan saluran air

bersih, dan fasilitas umum lainnya. Di sisi lain, pembangunan nonfisik berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan desa, dan pemanfaatan potensi lokal secara optimal.



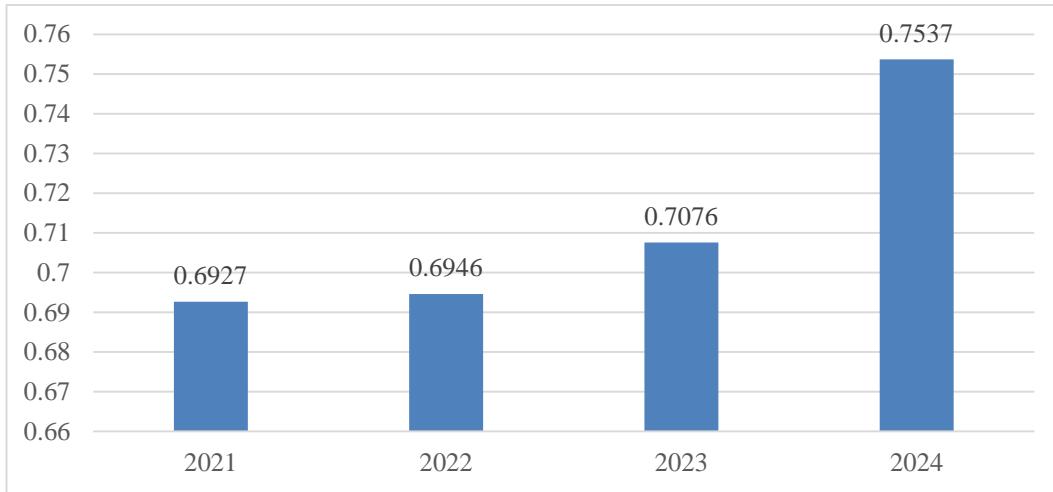
Gambar 7. Presentase Anggaran dan Belanja Desa Sukanegeri Jaya 2025

Sumber : Profil Desa Sukanegeri Jaya, 2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwasannya anggaran belanja desa Sukanegeri Jaya lebih dominan pada bidang pelaksanaan pembangunan desa, yaitu sebesar Rp. 534.653.270 juta rupiah. Selanjutnya untuk penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 379.633.060 juta rupiah yang digunakan untuk rapat ataupun hal hal yang berkaitan dengan kemsyawaratan desa.

Pada bidang pembinaan kemasyarakatan desa Rp. 147.699.000 juta rupiah, digunakan untuk kegiatan seperti festival kebudayaan, ataupun acara-acara besar yang lain, lalu pada bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 33.640.410 juta rupiah, dana ini digunakan untuk kegiatan yang berbasis pada masyarakat seperti pelatihan ibu-ibu PKK, karang taruna dan lain sebagainya.

Pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dianggarkan sebesar Rp. 18.000.000 juta rupiah untuk masyarakat yang mengalami musibah seperti banjir, jatuh sakit, ataupun tertimpa musibah, dana anggaran ini juga digunakan untuk bensin ambulan desa yang disediakan untuk masyarakat apabila ingin berobat ke kota.



Gambar 8. Indeks Desa Membangun Sukanegeri Jaya 2021-2024

Sumber : Profil Desa Sukanegeri Jaya, 2024.

Indeks desa membangun digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan dan kemandirian suatu desa berdasarkan 3 aspek, yaitu sosial, ekonomi, dan ekologi. Berdasarkan data diatas desa Sukanegeri jaya memiliki peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, terbukti dari data diatas, pada tahun 2021-2022 IDM Desa Sukanegeri Jaya dalam taraf berkembang. Namun, pada tahun 2023-2024 desa Sukanegeri Jaya di klasifikasikan sebagai desa yang maju dalam segi sosial, ekonomi, ekologi.

VI KESIMPULAN

6.2 Kesimpulan

1. Kebijakan pemerintah tentang penerapan BLT DD yang memiliki tujuan untuk menanggulangi keluarga miskin atau tidak mampu yang terdampak dari pandemi COVID-19 justru membuat warga bergantung terhadap bantuan tersebut. Selain itu kurangnya lahan pertanian juga menjadikan warga hanya bekerja sebagai buruh tani di lahan orang lain. Hal tersebut mentidakibatkan pendapatan yang rendah dan tidak stabil karena bergantung pada gaji harian atau musiman. Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya pun memanfaatkan dana desa untuk menanggulanginya, yaitu dengan memberikan suntikan modal kepada BUMDes dan mendanai pelatihan untuk PKK. Sistem kerja BUMDes Se'at Jaya adalah bekerja sama dengan Unit Jaga Karya dan Sanggar Putri Ayu dengan memberikan modal guna peningkatan produksi setiap unit dan keuntungan menggunakan sistem bagi dua dari hasil pendapatan. Sementara, untuk pelatihan guna meningkatkan keterampilan ibu-ibu anggota PKK diadakan pelatihan pembuatan keripik dan orak-arik talas.
2. Beberapa kendala yang terjadi dalam upaya pemerintah desa menanggulangi kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yaitu kendala utama berkaitan dengan pemasaran produk yang belum optimal, lambatnya pengembalian modal dari unit-unit yang bekerja sama dengan BUMDes, pola pikir masyarakat yang masih berkaitan dengan “Pamali”. Sementara, untuk pelatihan pembuatan keripik dan orak-arik talas kendala yang terjadi adalah peran ganda yang terjadi pada anggota PKK yang diisi oleh ibu-ibu rumah tangga sehingga tidak mudah untuk bisa memengajak semuanya ikut berpartisipasi karena sulitnya mengatur waktu. Selain itu, langkahnya talas, mahalnya minyak dan cabai juga menjadi kendala saat PKK membuka usaha keripik dan orak-arik talas.

3. Dampak positif yang dirasakan meliputi kemudahan dalam mendapatkan permodalan, peningkatan pendapatan masyarakat, keterampilan baru, dan terbukanya akses terhadap peluang usaha. Banyak masyarakat yang kini lebih percaya diri dan mulai memanfaatkan peluang ekonomi untuk memperbaiki taraf hidup mereka.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan masyarakat di Desa Sukanegeri Jaya telah memberikan dasar yang kuat untuk mengatasi kemiskinan. Dengan memperbaiki kendala yang ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat, program ini dapat menjadi model pemberdayaan yang berkelanjutan.

6.3 Saran

Berikut saran yang dapat penulis berikan :

1. Bagi pemerintah Desa Sukanegeri Jaya perlu memberikan pelatihan pemasaran digital yang lebih intensif kepada masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil seperti pengrajin golok, kain tenun, dan produsen keripik talas. Pelatihan ini mencakup penggunaan media sosial, pembuatan katalog online, hingga strategi pemasaran melalui platform *e-commerce*. Hal ini dapat membantu produk lokal desa menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing di tingkat regional atau nasional. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus diberdayakan sebagai fasilitator utama dalam pemasaran produk lokal. BUMDes dapat berperan sebagai agen penghubung antara masyarakat dan pasar yang lebih besar. Selain itu, BUMDes dapat menyediakan fasilitas pengemasan, *branding*, dan promosi yang lebih profesional untuk meningkatkan nilai tambah produk desa.
2. Bagi masyarakat Desa Sukanegeri Jaya agar dapat memanfaatkan program yang telah diberikan oleh pemerintah desa untuk menunjang kualitas hidup yang lebih baik. Pelatihan yang diberikan dapat menjadi bekal untuk membuka usaha dan lapangan pekerjaan agar tidak bergantung terhadap pemerintah.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang sama, hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat dijadikan literatur sehingga penelitian

baru nantinya dapat membahas lebih kompleks dari penelitian ini, terutama berjalannya organisasi BUMDes, seperti perbedaan sistem kerja sama antara pengurus lama dengan pengurus baru. Selain bekerja sama dengan Unit Jaga Karya dan Sanggar Putri Ayu, BUMDes juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang beroperasi pada jaminan tenaga kerja dan jaminan sosial, hampir seluruh warga desa mengikuti program tersebut tetapi harus divakumkan karena adanya perubahan pergantian pengurus BUMDes sehingga diharapkan untuk penelitian selanjutnya memperdalam pembahasan mengenai sistem kerja sama BUMDes dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat membahas lebih dalam terkait kendala antara BUMDes dengan unit usaha lokal, seperti kendala interaksi antara BUMDes dengan unit usaha lokal yang menyebabkan perbedaan pandangan pada beberapa anggota sehingga penelitian selanjutnya dapat memberikan masukan untuk membangun BUMDes lebih baik dan dapat dijadikan refrensi bagi BUMDes yang memiliki kendala hal serupa.

Daftar Pustaka

- Arfiansyah, M. A. (2020). Dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 1(1), 91–106. <https://www.lisyabab.staimaswonogiri.ac.id/lisyabab/article/view/20>
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2010). Peraturan presiden republik indo (No. 15). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41038/perpres-no-15-tahun-2010>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Jumlah dan persentase penduduk miskin menurut provinsi, 2024*. bps.go.id. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/UkVkWGJVZFNWakl6VWxKVFQwWjVWeTlSZNabVFUMDkjMw==/jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html?year=2024>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2025). *Persentase penduduk miskin (Persen)*. lampung.bps.go.id. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzYjMg==/persentase-penduduk-miskin.html>
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat : studi kasus Daerah Istimewa Yogyakarta*. Deepublish.
- Damsar. (2017). *Pengantar teori sosiologi* (2nd Ed.). Kencana.
- Dinata, S. I., Al-Fairusy, M., & Taran, J. P. (2023). Strategi kepala desa menanggulangi kemiskinan di Desa Along Kabupaten Simeulue. *Al-Ukhwah : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(3), 15–24. <Https://Ejournal.Staindirundeng.Ac.Id/Index.Php/Ukhwah/Article/View/2092>
- Erowati, D. (2021). *Kebijakan dana desa bagi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa*. Scopindo Media Pustaka.
- Hendardi, B. (2017). *Sistem pemerintahan negara indonesia*. (A. Kholid (Ed.)). Istana Media.
- Hilmi, Marumu, M. N. H. D., Ramlawati, & Peuru, C. D. (2022). Pengaruh jumlah penduduk dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten tolitoli. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 20–27.
- Izzati, R. Al. (2021). *Situasi kemiskinan selama pandemi*. smeru.or.id. <https://smeru.or.id/id/article-id/situasi-kemiskinan-selama-pandemi>
- Jibrani, R. I. (2023). Upaya pemerintah desa untuk menanggulangi kemiskinan di Desa Batuah. *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(2), 42–51.

- <https://journal.actual-insight.com/index.php/nomos/article/view/913>
- Josep. (2018). *Konsep dan strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan*. Indocamp.
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., & Aliman, M. (2020). Meta analisis: Perkembangan teori struktural fungsional dalam sosiologi pendidikan. *Jurnal Perspektif*, 3(1), 1–8. <https://perspektif.ppj.unp.ac.id/index.php/perspektif/article/view/168>
- Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4489>
- Kurniawan, S. B., & Wea, T. (2022). *Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat : Studi kasus di Desa Landungsari Kecamatan dan Kabupaten Malang Jawa Timur*. Media Nusa Creative.
- Kusnandar, V. B. (2021). *10 kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Lampung pada Maret 2021*. databoks.katadata.co.id. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/abb19ad6aa20a3b/10-kabupaten-dengan-angka-kemiskinan-tertinggi-di-lampung-pada-maret-2021>
- Maria, W. N., Kirana, N. N., Ulpa, A., & Handayani, D. N. (2023). Implementasi program pemberdayaan masyarakat untuk menurunkan angka kemiskinan di Kota Pontianak. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 8(2), 210–224.
- Niko, N.-, & Yulasteriyani, Y. (2020). Pembangunan masyarakat miskin di pedesaan perspektif fungsionalisme struktural. *Muharrrik: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 3(02), 213–225. <Https://Doi.Org/10.37680/Muharrrik.V3i02.476>
- Novianto, D. (2019). *Peraturan pemerintah tentang dana desa*. (Alfarestyia and Claudia (Eds.)). CV Derwati Press.
- Oktara, L. P. (2019). *Buku pintar bijak mengelola dana desa* (M. K. Wardaya (Ed.); 1st Ed.). Literasi Desa Mandiri.
- Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya. (2024). Profil Desa Sukanegeri Jaya Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus [Unpublished manuscript]. Pemerintah Desa Sukanegeri Jaya.
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan dana desa* (Tarmizi (Ed.)). Bumi Aksara.
- Rijali, A. (2019). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81.
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan*. CV Nata Karya. <https://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf>

- Sistem Informasi Desa. (2024). *Dana desa.* sid.kemendesa.go.id. <https://sid.kemendesa.go.id/village-fund>
- Suparman, N., Washillah, G., & Juana, T. (2021). Efektivitas penyaluran bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat miskin terdampak COVID-19. *Jurnal Dialektika : Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 44–60. <https://jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/6>
- Utami, A. D. (2019). *Buku pintar pemberdayaan masyarakat desa*. (D. Wijayanti (Ed.); 1st Ed.). Penerbit Literasi Desa Mandiri.
- Wibowo, I. Z., & Lestari, P. (2021). Implementasi program dana desa melalui kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten). *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 10(2), 2–19. <https://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/societas/article/view/17152/16561>